



PENGADILAN TINGGI PADANG

**LAPORAN
PELAKSANAAN
KEGIATAN**

**(LPK)
TAHUN
2024**



**JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 54 KOTA PADANG
TLP. (0751) 23495 30554-34254**

SEKAPUR SIRIH

Kami bersyukur telah menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2024, sebagai pertanggungjawaban terhadap hasil rekapitulasi pencapaian kinerja dari seluruh Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang. Laporan ini dibuat berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 4506/SEK/OT1.6/XII/2024 Tanggal 24 Desember 2024 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024. Laporan ini sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Program Kerja. Menyangkut pertanggung jawaban program dan kegiatan yang dilaksanakan selama satu tahun anggaran dalam tahun 2024. Dalam laporan ini telah tertuang kinerja utama dengan didukung DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan sekaligus merupakan evaluasi bagi Pengadilan Tinggi Padang dalam menilai seberapa jauh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Semoga laporan ini dapat dijadikan pedoman untuk meningkatkan kinerja satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang.

Demikianlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan kami sajikan dan kami juga berharap, semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada keberhasilan penegakan hukum di Mahkamah Agung RI.

Hormat Kami,



H. Ade Komarudin, S.H, M.Hum



TENTANG PENGADILAN TINGGI PADANG

Pengadilan Tinggi Padang adalah salah satu Pengadilan Tinggi Bertipe A di Indonesia. Terletak pada Ibukota Provinsi Sumatera Barat yaitu Kota Padang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 54 Padang, Kode Pos 25129, Nomor Telepon (0751) 30554/23495 Faks. (0751) 34254. Pengadilan Tinggi Padang merupakan kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung RI yang membawahi 16 (enam belas) Pengadilan Negeri di wilayah hukum Sumatera Barat. Sebagai bagian dari peradilan umum, Pengadilan Tinggi Padang secara hirarki organisatoris dan administratif berada di bawah Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Tinggi Padang memiliki tugas pokok dalam hal mengadili perkara di tingkat banding, dan juga mempunyai fungsi yudikatif (penyelesaian perkara), pengawasan, pengaturan, dan fungsi administratif terhadap pengadilan-pengadilan tingkat pertama di wilayah hukumnya. Pengawasan rutin yang selalu dilakukan Pengadilan Tinggi Padang langsung ke daerah wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Kota dan Kabupaten di Propinsi Sumatera Barat.

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN TINGGI PADANG TAHUN 2024



WILAYAH YURISDIKSI SATUAN KERJA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI PADANG

f

No	Nama	Kelas Pengadilan	Wilayah Yurisdiksi
1	Pengadilan Negeri Padang	Kelas IA	Kota Padang dan Kab. Kepulauan Mentawai
2	Pengadilan Negeri Pariaman	Kelas IB	Kota Pariaman dan Kab. Padang Pariaman
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	Kelas IB	Kota Bukittinggi dan Kecamatan Ampek Angkek; Kecamatan Baso; Kecamatan Canduang; Kecamatan Kamang Magek Kecamatan Palupuh Kecamatan Tilatang Kamang
4	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	Kelas II	Seluruh wilayah Kabupaten Agam kecuali Kecamatan Ampek Angkek, Kecamatan Baso, Kecamatan Candung, Kecamatan Kamang Magek, Kecamatan Palupuh, Kecamatan Tilatang Kamang.
5	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	Kelas II	Kabupaten Pasaman Barat
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	Kelas II	Kabupaten Pasaman
7	Pengadilan Negeri Padang Panjang	Kelas II	Kota Padang Panjang dan tiga kecamatan di Kab. Tanah Datar (Kec. X Koto, Batipuh, dan Batipuh Selatan)
8	Pengadilan Negeri Payakumbuh	Kelas II	Kota Payakumbuh dan lima kecamatan di Kab. Lima Puluh Kota (Kec. Luhak, Lareh Sago Halaban, Situjuh Limo Nagari, Payakumbuh dan Akabiluru)
9	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	Kelas II	Kab. Lima Puluh Kota kecuali Kec. Luhak, Lareh Sago Halaban, Situjuh Limo Nagari, Payakumbuh dan Akabiluru
10	Pengadilan Negeri Batusangkar	Kelas II	Kab. Tanah Datar kecuali Kec. X Koto, Kec Batipuh dan Batipuh Selatan
11	Pengadilan Negeri Painan	Kelas II	Kabupaten Pesisir Selatan
12	Pengadilan Negeri Kotobaru	Kelas II	Kab. Solok, kecuali X Koto diatas, X Koto Singkarak, IX Koto Sungai Lasi dan Kec. Junjung Sirih dan wilayah Kab. Solok Selatan
13	Pengadilan Negeri Solok	Kelas II	Kota Solok dan empat kecamatan di Kab. Solok (X Koto diatas, X Koto Singkarak, IX Koto Sungai Lasi dan Kec. Junjung Sirih)
14	Pengadilan Negeri Sawahlunto	Kelas II	Kota Sawahlunto dan empat kecamatan di Kabupaten Sijunjung (Kec. Kupitan, IV Nagari, Koto VII dan Sumpur Kudus)
15	Pengadilan Negeri Muaro	Kelas II	Kab. Sijunjung, kecuali Kec. Kec. Kupitan, IV Nagari, Koto VII dan Sumpur Kudus
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	Kelas II	Kabupaten Dharmasraya



VISI

"Terwujudnya Pengadilan Tinggi Padang Yang Agung"

MISI

- 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Padang;***
- 2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;***
- 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tinggi Padang;***
- 4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Pengadilan Tinggi Padang;***



H. Ade Komarudin, S.H., M.Hum

KETUA
PENGADILAN TINGGI
PADANG

PROFIL PIMPINAN

NIP : 19580422 198601 1 003
TTL : BANDUNG, 22 APRIL 1958
JABATAN : KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG
PANGKAT : IV / E

RIWAYAT JABATAN

- Ketua Pengadilan Tinggi Ambon
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan
- Ketua Pengadilan Negeri Palembang
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang
- Ketua Pengadilan Negeri Maros
- Hakim Pengadilan Negeri Surabaya
- Ketua Hakim Pengadilan Negeri Mempawah
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang
- Hakim Pengadilan Negeri Tangerang
- Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya
- Hakim Pengadilan Negeri Ciamis
- Hakim Pengadilan Negeri Bangko
- Calon Hakim Pengadilan Negeri Bandung



Suwono, S.H., S.E., M.Hum

**WAKIL KETUA
PENGADILAN TINGGI
PADANG**

PROFIL PIMPINAN

NIP : 196301011992121001
TTL : JOMBANG, 01 JANUARI 1963
JABATAN : WAKIL KETUA
PANGKAT : PEMBINA UTAMA (IV/E)

RIWAYAT JABATAN

- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2023
- Wakil Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2022
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin Tahun 2022
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Tahun 2019
- Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2017
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2017
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon Tahun 2016
- Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2015
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Tahun 2013



Nama Hakim Tinggi

1. Asmuddin, S.H., M.H.
2. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.
3. Irwan Efendi, S.H., M.H.
4. Masrizal, S.H., M.H.
5. Rita Elsy, S.H., M.H.
6. Yosdi, S.H.
7. Admiral, S.H., M.H.
8. Masrul, S.H., M.H.
9. Jon Effreddi, S.H., M.H.
10. Surachmat, S.H., M.H.
11. Ida Ratnawati, S.H., M.H.
12. Heriyenti, S.H., M.H.

Nama Hakim Adhoc

1. Lendrawati, S.H., M.Hum.
2. Firdaus, S.H., M.Hum.
3. Ahmad Dendy Syaifullah, S.H., M.H.



Endri Novian, S.E., M.M.

**SEKRETARIS
PENGADILAN TINGGI
PADANG**

PROFIL SEKRETARIS

NIP : 197511092003121001
Jabatan : Sekretaris
Golongan : Pembina Utama Muda
(IV/c)
Pendidikan: S2 – UNB



R. Moch Chairael Fathah, S.H., M.Hum.

**PANITERA
PENGADILAN TINGGI
PADANG**

PROFIL PANITERA

NIP : 196611201991031002
Jabatan : Panitera
Golongan : Pembina Tk I (IV/b)
Pendidikan: S2



PEJABAT STRUKTURAL



Nama	Jabatan
1. R. Moch Chairael Fathah, S.H., M.Hum. 2. Endri Novian, S.E., M.M.	Panitera Sekretaris
3. Budiman, S.H. 4. Ade Candra, S.H.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
5. Nurmaidarlis, S.H. 6. Marhaban, S.H., M.H. 7. Zulkifli, S.H. 8. Syalferri, S.H.	Panitera Muda Pidana Panitera Muda Khusus Tipikor Panitera Muda Hukum Panitera Muda Perdata
9. Aznel Mahendra, S.Si., M.H. 10. Ayu Davmayanti, S.H. 11. Novita Sari, S.Kom. 12. Suyono, S.H.	Kepala Subbagian Rencana Program dan Anggaran Kepala Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi Kepala Subbagian Keuangan dan Pelaporan Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

20
25

PENGADILAN TINGGI PADANG



**KELUARGA BESAR
PENGADILAN
TINGGI PADANG**



KEGIATAN PENGADILAN TINGGI PADANG TAHUN 2024

SOSIALISASI PERMA NO. 6, 7, DAN 8 TAHUN 2022



Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Padang dan diikuti oleh seluruh Pengadilan Negeri dan Aparat Penegak Hukum se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang.

KUNJUNGAN KERJA YM KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG DAN TEMU RAMAH DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN MENTAWAI



YM Ketua Pengadilan Tinggi Padang Bapak H. Ade Komarudin, S.H., M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Bapak Suwono, S.H., S.E., M.Hum, Sekretaris Pengadilan Tinggi Padang Bapak Endri Novian, S.E., M.M., beserta rombongan melakukan Kunjungan Kerja dan Temu Ramah dengan Pemerintah Kabupaten Mentawai pada hari Minggu 27 Oktober Tahun 2024.

Kunjungan dalam rangka meninjau secara langsung lokasi tanah pembangunan Pengadilan Negeri Kabupaten Kepulauan Mentawai.

RAPAT KOORDINASI DENGAN DIRJEN BADILLUM



11 November 2024, Bertempatkan di Ruang Commend Center Pengadilan Tinggi Padang Pejabat struktural Pengadilan Tinggi Padang dan Petugas Pengaduan Pengadilan Tinggi Padang menghadiri Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) Mahkamah Agung RI secara daring melalui Aplikasi Zoom pukul 09.00 sampai dengan selesai dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan pada seluruh pengadilan sebagai voorpost Pimpinan pada satuan kerja di

PRESTASI DAN PENGHARGAAN PENGADILAN TINGGI PADANG TAHUN 2024

❖ Pengadilan Tinggi Padang Memperoleh Penghargaan Predikat "Unggul"

Bertempat di Hotel Grand Mercure Solo Baru Jl. IR. Soekarno, Dusun II Magendo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Ketua Pengadilan Tinggi Padang Bapak H. Ade Komarudin, S.H., M.Hum beserta Panitera Pengadilan Tinggi Padang Bapak R. Moch. Chairael Fathah, S.H., M.Hum. dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Padang Bapak Endri Novian, S.E., M.M



❖ Pengadilan Tinggi Padang Memperoleh Penghargaan "Role Model Sekretaris Pengadilan Tinggi"

Sekretaris Pengadilan Tinggi Padang Bapak Endri Novian, S.E., M.M. menghadiri Penyerahan Perhargaan Penghargaan Sertifikat AMPUH Berpredikat Unggul & Penghargaan Abhinaya Upangga Wisesa 2024 secara langsung.



❖ Pengadilan Tinggi Padang Memperoleh Penghargaan Penyampaian Gaji Induk Terbaik Semester I Tahun 2024

Peringkat Kedua Kategori Penyampaian Gaji Induk Terbaik Semester 1 Tahun



PRESTASI DAN PENGHARGAAN PENGADILAN NEGERI SEWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI PADANG TAHUN 2024

No	Keterangan	Dokumentasi
1	Pengadilan Negeri Padang ✓ Terbaik III Kategori Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Terbaik Pengadilan Negeri se Wilayah Hukum PT Padang	
2	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping ✓ Sebagai Peringkat II Satker dengan Nilai IKPA tertinggi (Pagu Besar) Semester I TA 2024	
3.	Pengadilan Negeri Bukittinggi ✓ Sebagai Peringkat I Nilai IKPA Satker Kategori Pagu Belanja Kecil 5 Indikator Periode Semester I Tahun 2024	

4	Pengadilan Negeri Payakumbuh ✓ Piagam Penghargaan Rengga Satria, S.Kom sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Satker "Peringkat II" Kategori Tercepat dalam memperoleh Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR) dari KPPN Bukittinggi.	 The image shows a certificate titled 'PIAGAM PENGHARGAAN' (Certificate of Appreciation) issued by the Ministry of Finance, Republic of Indonesia, Directorate General of Treasury. It is awarded to Rengga Satria, S.Kom, as the Authorized User of the Satker 'Peringkat II' (Category II) for the fastest in obtaining the Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR) from KPPN Bukittinggi. The certificate number is KEP-70/KPN.0302/2024, dated August 22, 2024. The recipient's name is Khairil Indra.
5.	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping ✓ Sebagai Peringkat II Satker dengan Nilai IKPA Tertinggi (Pagu Besar) Semester I Tahun 2024 ✓ Diberikan Tanggal 13 Agustus 2024 Oleh Kantor KPPN Tipe A2 Lubuk Sikaping.	 The image shows a certificate titled 'PIAGAM PENGHARGAAN' (Certificate of Appreciation) issued by the Ministry of Finance, Republic of Indonesia, Directorate General of Treasury. It is awarded to Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping (098828) as the Peringkat II (Category II) Satker with the highest IKPA value (Pagu Besar) for Semester I of 2024. The certificate number is KET-16/KPN.0304/2024, dated August 13, 2024. The recipient's name is Syahravi Munthe.
6	Pengadilan Negeri Solok ✓ Peringkat Pertama Kategori Satuan Kerja dengan Laporan Keuangan Terbaik Tahun 2023 di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang (0800) DIPA Badan Urusan Administrasi (01) Mahkamah Agung RI (005) ✓ Diberikan Tanggal 3 Juli 2024 oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang	 The image shows a certificate titled 'PIAGAM PENGHARGAAN' (Certificate of Appreciation) issued by the Pengadilan Tinggi Agama Padang. It is awarded to Pengadilan Negeri Solok (0800) as the Peringkat Pertama (Category I) for the best financial report (Laporan Keuangan Terbaik) for the year 2023 in the Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang (0800) DIPA Badan Urusan Administrasi (01) Mahkamah Agung RI (005). The certificate number is KEP-01/KPN.0304/2024, dated July 3, 2024. The recipient's name is Syahravi Munthe.

7	Pengadilan Negeri Painan ✓ Penghargaan Peringkat III Pelaksanaan e-Berpadu Terbaik Tahun 2023 se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang.	
8	Pengadilan Negeri Padang Panjang ✓ Piagam Penghargaan Peringkat III Kategori Satker Tercepat dalam Memperoleh Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR) Tahun 2024	

9	Pengadilan Negeri Lubuk Basung ✓ Peringkat I Penerima Anugrah Sebagai Pengadilan Terbaik dalam Pelaksanaan E-Berpadu Kategori Pengadilan Negeri dengan beban perkara 1-500	
10	Pengadilan Negeri Tanjung Pati ✓ Kualifikasi Cukup Informatif pada Anugrah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 ✓ Diberikan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumbar	
11	Pengadilan Negeri Kotobaru ✓ Peringkat ke 5 Satuan Kerja Berprestasi Kategori Pelaksanaan Digitalisasi Pembayaran Melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Periode Semester I Tahun 2024	
12	Pengadilan Negeri Muaro ✓ Nilai IKPA DIPA 03	

	Terbaik Se – Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2024 ✓ Diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang Tanggal 10 Januari 2025	
13	Pengadilan Negeri Pasaman Barat ✓ Penghargaan Terhadap Prestasi dan Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pasaman Barat Tahun 2024 ✓ Diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang dan Panitia Pengadilan Tinggi Padang	
14	Pengadilan Negeri Pulau Punjung ✓ Terbaik III Evaluasi Implementasi SIPP Terbaik Pengadilan Negeri se Wilayah Hukum PT Padang ✓ Diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang Tahun Tanggal 10 Januari 2024	
15	Pengadilan Negeri Pariaman ✓ Penghargaan dari KPPN Peringkat	

	empat	
16	Pengadilan Negeri Sawahlunto ✓ Terbaik III Satuan Kerja Dengan Penyerapan Realisasi Anggran Terbaik DIPA 01 Tahun Aanggran 2024	



PENGHARGAAN PN SEWILAYAH HUKUM PT PADANG



pt-padang.go.id

- PN Padang Panjang- peringkat III kategori satker tercepat dalam memperoleh surat hasil rekonsiliasi
- PN Lubuk Basung- peringkat I pengadilan terbaik dalam pelaksanaan E-BERPADU
- PN Pariaman penghargaan dari KPPN Padang peringkat ke empat kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik semester I Tahun 2024 Pagu Kecil (Kurang dari 10 M) untuk DIPA BUA 098792
- PN Lubuk Sikaping- satker yang telah menerapkan layanan bagi penyandang disabilitas oleh Dinas sosial pada tanggal 5 Maret 2024
- PN Lubuk Sikaping- peringkat II satker dengan nilai IKPA tertinggi (Pagu besar) semester I TA 2024 oleh KPPN tanggal 13 Agustus 2024
- PN Lubuk Sikaping- terbaik II Satker dengan penyusunan Laporan Keuangan Terbaik Semester I TA 2024 oleh KPPN tanggal 13 Agustus 2024
- PN Lubuk Sikaping-Sertifikat Ampuh (Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh) oleh MA tanggal 5 Desember 2024
- PN Padang Mediator Terbaik atas nama H. Bakri
- Pengadilan Negeri Tanjung Pati mendapatkan penghargaan dari KPPN Bukittinggi peringkat II nilai IKPA satker kategori belanja kecil 5 indikator periode semester I 2024
- PN Payakumbuh - meraih peringkat prediket UNGGUL dalam penilaian sertifikasi AMPUH DITJEN BADILUM MARI.
- PN Payakumbuh- peringkat II Satker tercepat dalam memperoleh surat hasil rekonsiliasi (SHR) oleh KPPN Bukittinggi.
- PN Payakumbuh- Peringkat II Kuasa Pengguna Anggaran dalam memperoleh surat hasil rekonsiliasi (SHR) oleh KPPN Bukittinggi.
- PN Muaro-Peringkat Ke-1 Dalam Kategori Ketepatan dan Kecepatan Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran Semester II Tahun 2023
- PN Muaro- Peringkat Ke-2 Dalam Kategori Ketepatan dan Kecepatan Penyampaian Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2023 Untuk Satker 400462
- PN Muaro-Peringkat Ke-1 Dalam Kategori Ketepatan dan Kecepatan Penyampaian Laporan Keuangan Audited Tahun 2023
- PN Muaro- Peringkat Ke-3 Dalam Kategori IKPA Terbaik Triwulan I Tahun 2024 (Pagu Kecil Di Bawah Rp2,5 M)
- PN Muaro-Peringkat Ke-2 Dalam Kategori Ketepatan dan Kecepatan Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran Periode Semester I Tahun 2024
- PN Koto Baru-Peringkat Kedua Kategori satuan kerja dengan laporan keuangan terbaik dari PTA Padang
- PN Koto Baru-Peringkat Kelima Satuan Kerja Berprestasi Kategor Pelaksanaan Digitalisasi Pembayaran melalui KKP dari KPPN Solok

DAFTAR ISI

Sekapur Sirih.....	I
Tentang Pengadilan	II
Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Padang	III
Visi dan Misi	IV
Profil Ketua Pengadilan Tinggi Padang	V
Profil Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang	VI
Hakim Tinggi	VII
Panitera dan Sekretaris	VIII
Pejabat Struktural.....	IX
Keluarga Besar Pengadilan Tinggi Padang.....	X
Kegiatan Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2024	XI
Penghargaan Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2024.....	XIII
Penghargaan Pengadilan Negeri Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2024	XIII
BAB I Pendahuluan	1
A. Kebijakan Umum	2
B. Struktur Organisasi	2
BAB II Keadaan Perkara Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang	3
A. Keadaan Perkara	3
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama	3
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding	8
3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi.....	8
4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali.....	11
B. Penyelesaian Perkara	14
1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus	14
2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu	15
3. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil melalui Mediasi	18
4. Jumlah Perkara Pidana Anak yang Berhasil melalui Diversi.....	19
C. Program Prioritas Nasional	20
1. Posbakum	21
2. Sidang Keliling/ Pelayanan Terpadu	22
3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)	23
BAB III Sumber Daya Manusia	25
D. Mutasi	34
E. Promosi	35
F. Pensiun.....	36
G. Diklat (SDM teknis dan Non teknis)	37

BAB IV Pengelolaan Keuangan, sarana Prasarana dan Teknologi Informasi	39
A. Pengelolaan Keuangan	39
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	45
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	92
BAB V Peningkatan Pelayanan Publik.....	100
A. Akreditasi Penjaminan Mutu	100
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	105
C. Inovasi Pelayanan Publik.....	107
BAB VI Pengawasan	118
A. Internal.....	118
B. Evaluasi	135
BAB VII Penutup	138
A. Kesimpulan.....	138
B. Saran.....	139
Lampiran	
SK Tim Penyusun Laporan Pelaksana Kegiatan	140

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Keadaan Perkara Perdata Pengadilan Tingkat Pertama	5
Tabel 2 Keadaan Perkara Pidana Pengadilan Tingkat Pertama	6
Tabel 3 Keadaan Perkara Lalu Lintas	7
Tabel 4 Keadaan Perkara Kasasi Perdata Tingkat Pertama	8
Tabel 5 Keadaan Perkara Kasasi Pidana Tingkat Pertama	8
Tabel 6 Keadaan Perkara Kasasi PHI Pengadilan Negeri Padang	10
Tabel 7 Keadaan Perkara Kasasi Tingkat Banding	10
Tabel 8 Keadaan Perkara Perdata Peninjauan Kembali di Tingkat Pertama	11
Tabel 9 Keadaan Perkara Pidana Peninjauan Kembali di Tingkat Pertama	11
Tabel 10 Keadaan Perkara PHI Peninjauan Kembali di Tingkat Pertama	13
Tabel 11 Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pengadilan Tinggi Padang	13
Tabel 12 Jumlah Sisa Perkara Tahun 2023 yang Putus 2024	14
Tabel 13 Jumlah Perkara Perdata yang Putus Tepat Waktu	15
Tabel 14 Jumlah Perkara Pidana yang Putus Tepat Waktu	16
Tabel 15 Jumlah Perkara Pidana Lalu Lintas yang Putus Tepat Waktu	17
Tabel 16 Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Mediasi	18
Tabel 17 Jumlah Perkara Pidana yang Berhasil Melalui Diversi	20
Tabel 18 Realisasi Anggaran Posbakum dan Sidang Keliling	21
Tabel 19 Perkara Prodeo	23
Tabel 20 Data Pegawai Pengadilan Tinggi Padang	25
Tabel 21 Data Mutasi pada Satuan Kerja di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang	34
Tabel 22 Data Promosi di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang	35
Tabel 23 Data Pensiun pada Satuan Kerja Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang	36
Tabel 24 Data Diklat Teknis dan Non Teknis	37
Tabel 24 Data Diklat Teknis dan Non Teknis	37
Tabel 25 Realisasi DIPA 01	39
Tabel 26 Realisasi DIPA 03	44
Tabel 27 Sarana dan Prasarana Kantor	45
Tabel 28 Kondisi Sertifikasi Tanah	85
Tabel 29 Kondisi Rumah Dinas	87
Tabel 30 Kondisi Kendaraan Dinas	89
Tabel 31 Data E- Court Satuan Kerja	94
Tabel 32 Implementasi SIPP	98

Tabel 33 Kategori Predikat pada Program AMPUH	101
Tabel 34 Nilai AMPUH Satuan Kerja berdasarkan KEKA Badillum	102
Tabel 35 Penghargaan PTSP Pengadilan Tingkat Pertama	106
Tabel 36 Inovasi Pelayanan Publik Pengadilan Tinggi Padang	107
Tabel 37 Inovasi Pelayanan Publik Pengadilan Tingkat Pertama	109
Tabel 38 Rekap Hasil Pengawasan	119
Tabel 39 Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Satuan Kerja Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang	135

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Padang	2
Gambar 2 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri	3
Gambar 3 Kondisi Perkara Pengadilan Tinggi Padang	8
Gambar 4 Metode Penilaian dan Evaluasi AMPUH	101
Gambar 5 Fitur ZI pada <i>Website</i> Pengadilan Tinggi Padang	104
Gambar 6 Alur Pelayanan PTSP dan Pedoman PTS pada Website Pengadilan Tinggi Padang	105

BAB I PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM

B. STRUKTUR ORGANISASI



PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Padang tahun 2024 merujuk pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor 4506/SEK/OT1.6/XII/2024. Laporan ini terdiri dari tujuh Bab yang meliputi ; Bab I Pendahuluan, Bab II memuat Keadaan Perkara di Pengadilan Tinggi Padang, Bab III memuat Sumber Daya Manusia, Bab IV memuat Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi. Sedangkan Bab V memuat Peningkatan Pelayanan Publik, Bab VI memuat Pengawasan dan Bab VII memuat Penutup berupa kesimpulan dan saran.

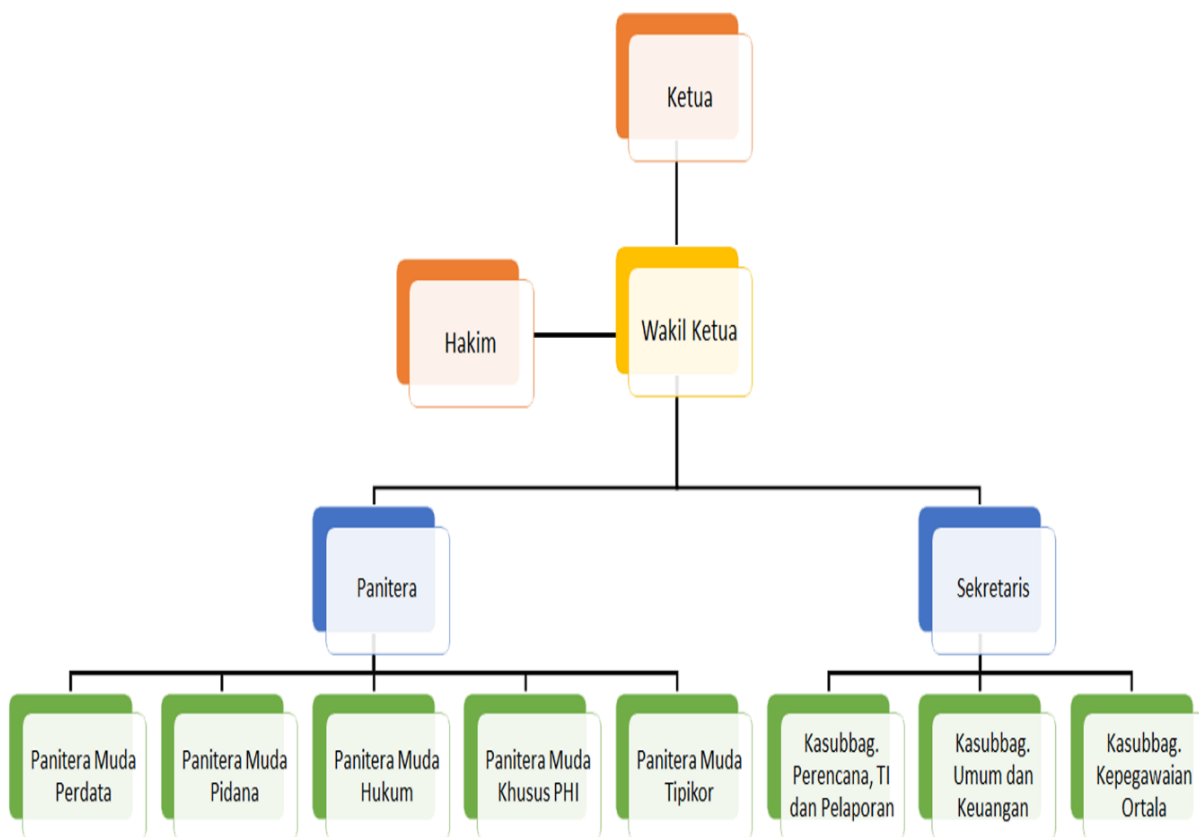
B. STRUKTUR ORGANISASI

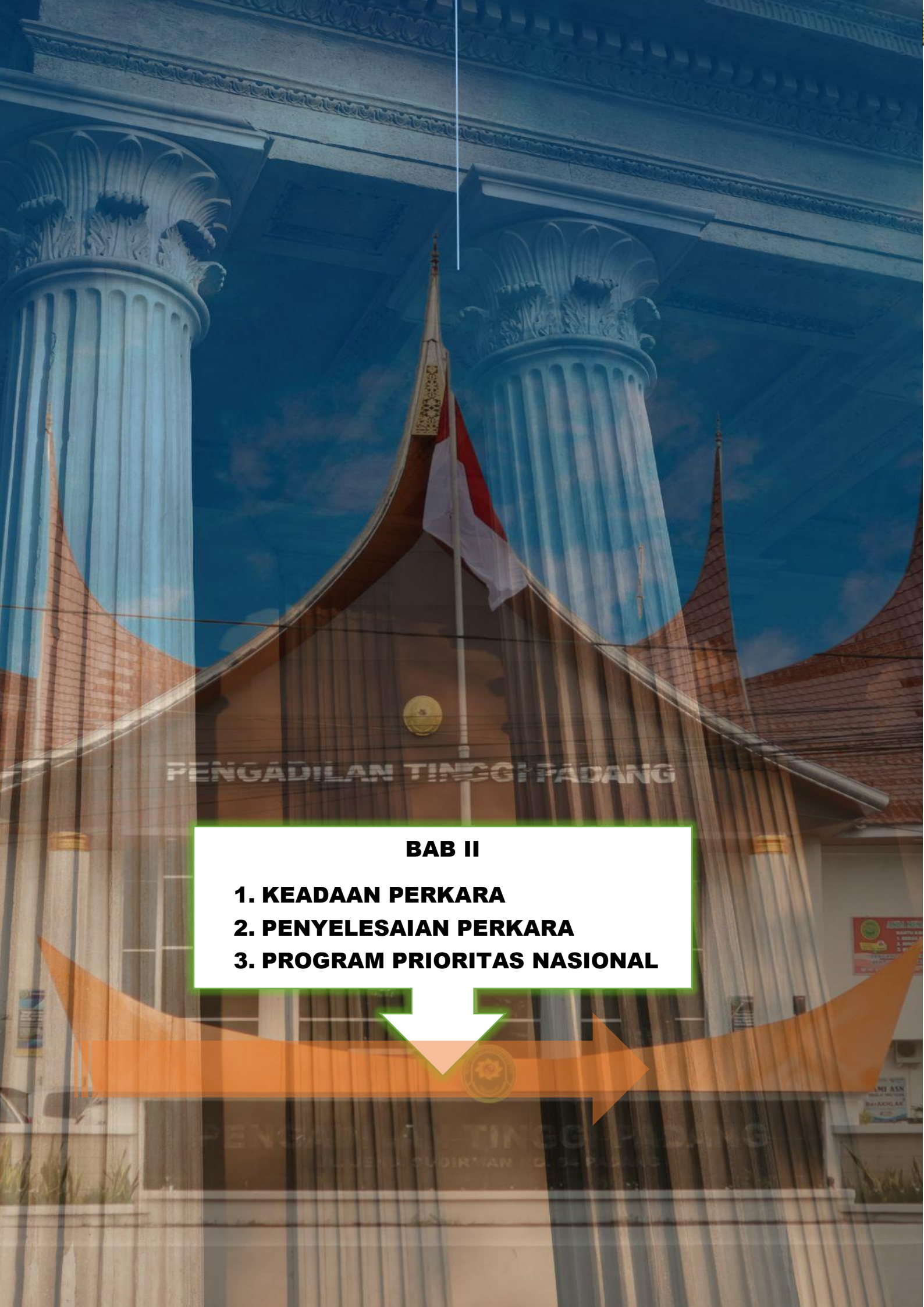
Struktur organisasi pada Pengadilan Tinggi Padang merujuk pada dasar hukum Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Dalam hal ini, Pengadilan Tinggi Padang memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Padang



Gambar 2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang





PENGADILAN TINGGI PADANG

BAB II

- 1. KEADAAN PERKARA**
- 2. PENYELESAIAN PERKARA**
- 3. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL**





A. KEADAAN PERKARA DI TINGKAT PERTAMA

Data yang ditampilkan pada laporan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2024 merupakan data dari bulan Januari s.d Desember 2024 terkait kondisi perkara yang sudah diselesaikan ataupun yang masih tersisa pada tahun 2024.

A.1. Keadaan Perkara Perdata Pengadilan Tingkat Pertama Di Wilayah

Hukum Pengadilan Tinggi Padang

Tabel 1. Jumlah Perkara Perdata Pengadilan Tingkat Pertama
Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2024

NO	PENGADILAN	Sisa 2023	Perkara Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa 2024
1	Pengadilan Negeri Padang	213	729	942	734	208
2	Pengadilan Negeri Pariaman	52	217	269	213	56
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	32	167	199	157	42
4	Pengadilan Negeri Sawahlunto	2	17	19	17	2
5	Pengadilan Negeri Payakumbuh	11	124	135	122	13
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	9	56	65	58	7
7	Pengadilan Negeri Batusangkar	14	96	110	104	6
8	Pengadilan Negeri Solok	8	99	107	103	4
9	Pengadilan Negeri Painan	16	67	83	39	17
10	Pengadilan Negeri Padang Panjang	2	41	43	39	4
11	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	13	82	95	72	23
12	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	12	63	75	71	4
13	Pengadilan Negeri Koto Baru	24	74	98	89	9
14	Pengadilan Negeri Muaro	6	53	59	53	6
15	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	13	147	160	144	16
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	7	53	60	54	6
Total	Total	434	2.085	2.519	2.069	423



Tabel 2. Keadaan Perkara Pidana Pengadilan Tingkat Pertama
di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2024

No	PENGADILAN	Sisa 2023	Perkara Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa 2024
1	Pengadilan Negeri Padang	277	1.212	1.489	1270	219
2	Pengadilan Negeri Pariaman	62	327	389	271	118
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	40	150	190	155	35
4	Pengadilan Negeri Sawahlunto	3	318	321	314	7
5	Pengadilan Negeri Payakumbuh	27	198	225	213	12
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	14	84	98	83	15
7	Pengadilan Negeri Batusangkar	8	133	141	136	5
8	Pengadilan Negeri Solok	0	126	126	125	1
9	Pengadilan Negeri Painan	18	181	199	172	27
10	Pengadilan Negeri Padang Panjang	3	93	96	96	0
11	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	9	154	163	154	9
12	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	2	147	149	148	1
13	Pengadilan Negeri Koto Baru	19	210	229	229	0
14	Pengadilan Negeri Muaro	8	132	140	122	18
15	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	10	242	252	232	20
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	15	316	331	315	16
Total	Jumlah	515	4.023	4.538	1.270	503

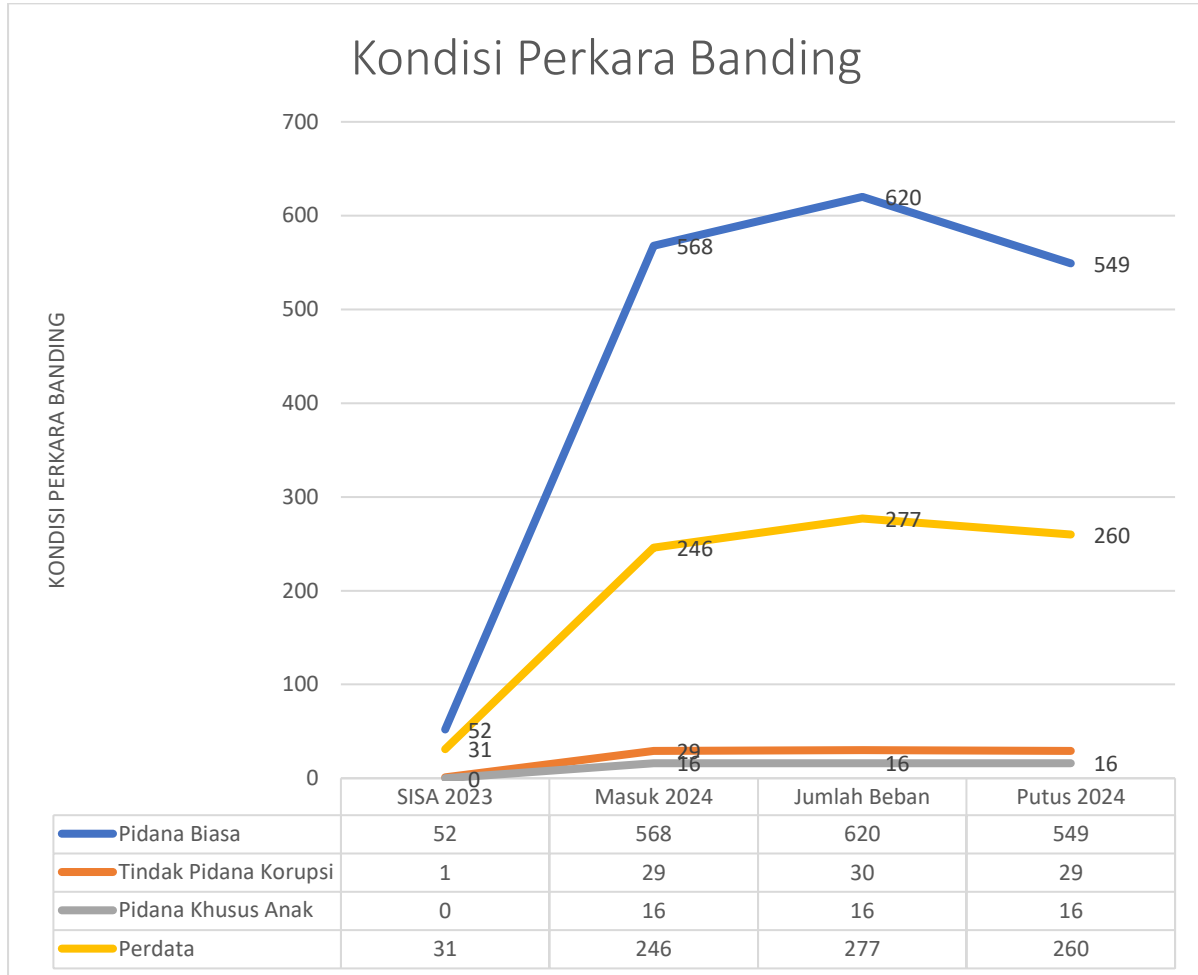


Tabel 3. Keadaan Perkara Lalu Lintas Pengadilan Tingkat Pertama
di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2024

NO	Pengadilan	Sisa 2023	Perkara Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa 2024
1	Pengadilan Negeri Padang	0	17.689	17.689	17.689	0
2	Pengadilan Negeri Pariaman	0	5.264	5.264	5.264	0
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	0	4.279	4.279	4.279	0
4	Pengadilan Negeri Sawahlunto	0	271	271	271	0
5	Pengadilan Negeri Payakumbuh	0	1.601	1.601	1.601	0
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	0	646	646	646	0
7	Pengadilan Negeri Batusangkar	0	1.572	1.572	1.572	0
8	Pengadilan Negeri Solok	0	2.436	2.436	2.436	0
9	Pengadilan Negeri Painan	0	1.738	1.738	1.738	0
10	Pengadilan Negeri Padang Panjang	0	1.208	1.208	1.208	0
11	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	0	1.891	1.891	1.891	0
12	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	0	895	895	895	0
13	Pengadilan Negeri Koto Baru	0	2.050	2.050	2.050	0
14	Pengadilan Negeri Muaro	0	612	612	612	0
15	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	0	2.565	2.565	2.565	0
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	0	589	589	589	0
Total	Jumlah	0	45.306	45.306	45.306	0

A.2 KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING

Gambar 1. Kondisi Perkara Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2024



A.3 . KEADAAN PERKARA KASASI

C.1. Keadaan Perkara Kasasi Pengadilan Tingkat Pertama

Tabel. 4 Perkara Kasasi Perdata Tingkat Pertama

NO	Pengadilan	Jumlah Putusan Banding	Yang Mengajukan Kasasi dari Putusan Banding
1	Pengadilan Negeri Padang	69	56
2	Pengadilan Negeri Pariaman	40	26
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	24	16



4	Pengadilan Negeri Sawahlunto	3	2
5	Pengadilan Negeri Payakumbuh	11	6
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	6	5
7	Pengadilan Negeri Batusangkar	12	6
8	Pengadilan Negeri Solok	13	11
9	Pengadilan Negeri Painan	12	8
10	Pengadilan Negeri Padang Panjang	-	-
11	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	8	1
12	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	11	6
13	Pengadilan Negeri Koto Baru	16	10
14	Pengadilan Negeri Muaro	5	2
15	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	15	11
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	7	4
	Jumlah	252	170

Tabel. 5 Perkara Kasasi Pidana Tingkat Pertama

NO	Pengadilan	Jumlah Putusan Banding	Yang Mengajukan Kasasi dari Putusan Banding
1	Pengadilan Negeri Padang	162	112
2	Pengadilan Negeri Pariaman	34	5
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	7	5
4	Pengadilan Negeri Sawahlunto	15	12
5	Pengadilan Negeri Payakumbuh	50	27
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	11	4



7	Pengadilan Negeri Batusangkar	13	7
8	Pengadilan Negeri Solok	23	12
9	Pengadilan Negeri Painan	39	8
10	Pengadilan Negeri Padang Panjang	7	1
11	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	21	6
12	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	50	35
13	Pengadilan Negeri Koto Baru	58	34
14	Pengadilan Negeri Muaro	23	11
15	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	35	16
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	29	17
	Jumlah	577	312

Tabel 6. Tabel Kasasi PHI Pengadilan Negeri Padang

NO	Pengadilan	Jumlah Putusan Banding	Yang Mengajukan Kasasi dari Putusan Banding	Tidak Mengajukan Kasasi dari Jumlah Putusan Banding
1	Pengadilan Negeri Padang (PHI)	34	16	18

A.3. KEADAAN PERKARA KASASI PENGADILAN TINGKAT BANDING

Tabel. 7. Keadaan Perkara Kasasi di Tingkat Banding

No	Klasifikasi	SISA 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Kasasi	Tidak Kasasi	total
1	Pidana Biasa	52	584	636	565	241	324	565
2	Tindak Pidana Korupsi	1	29	30	29	21	8	29
4	Perdata	31	246	277	260	114	146	260
	Jumlah	84	859	943	854	376	478	854



A.4. KEADAAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI

Tabel. 8 Perkara **Perdata** Peninjauan Kembali Pengadilan Tingkat Pertama

No	Satuan Kerja	Peninjauan Kembali		kasasi
		Tingkat Pertama	Tingkat Banding	
1	Pengadilan Negeri Padang	0	0	0
2	Pengadilan Negeri Pariaman	1	0	4
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	0	0	5
4	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	0	2	4
5	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	0	0	0
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	0	0	0
7	Pengadilan Negeri Padang Panjang	0	0	0
8	Pengadilan Negeri Payakumbuh	0	2	0
9	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	0	0	3
10	Pengadilan Negeri Batusangkar	0	0	6
11	Pengadilan Negeri Painan	1	0	3
12	Pengadilan Negeri Koto Baru	2	0	0
13	Pengadilan Negeri Solok	1	0	2
14	Pengadilan Negeri Sawahlunto	0	0	0
15	Pengadilan Negeri Muaro	1	0	1
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	0	0	1
	TOTAL	6	4	29



Tabel 9. Keadaan Perkara **Pidana** Peninjauan Kembali Pengadilan Tingkat Pertama
Wilayah Hukum Tinggi Padang Tahun 2024

No	Satuan Kerja	Peninjauan Kembali		
		Tingkat Pertama	Tingkat Banding	kasasi
1	Pengadilan Negeri Padang	11	4	0
2	Pengadilan Negeri Pariaman	1	34	5
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	32	0	0
4	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	3	0	0
5	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	5	0	0
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	12	0	1
7	Pengadilan Negeri Padang Panjang	6	0	0
8	Pengadilan Negeri Payakumbuh	18	17	12
9	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	13	4	2
10	Pengadilan Negeri Batusangkar	5	0	0
11	Pengadilan Negeri Painan	4	0	0
12	Pengadilan Negeri Koto Baru	1	0	1
13	Pengadilan Negeri Solok	2	0	0
14	Pengadilan Negeri Sawahlunto	0	0	0
15	Pengadilan Negeri Muaro	2	0	0
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	3	2	2
	TOTAL	118	61	23



Tabel 10. Keadaan Perkara PHI Peninjauan Kembali Pengadilan Tingkat Pertama
Wilayah Hukum Tinggi Padang Tahun 2024

No	Satuan Kerja	Peninjauan Kembali		
		Tingkat Pertama	Tingkat Banding	kasasi
1	Pengadilan Negeri Padang	0	0	0

Tabel 11. Kondisi Perkara Peninjauan Kembali
pada Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2024

No	Klasifikasi Perkara	Jumlah Peninjauan Kembali
1	Perdata	41
2	Pidana	32
3	Tipikor	2
	Jumlah	75



B PENYELESAIAN PERKARA

B.1 . Jumlah Sisa Perkara yang Diputus

Tabel 12. Jumlah Sisa Perkara Tahun 2023
pada Pengadilan Tingkat Pertama Yang diputus di Tahun 2024

NO	Pengadilan	Sisa Perkara 2023	Putus 2024	Capaian
1	Pengadilan Negeri Padang	213	213	100%
2	Pengadilan Negeri Pariaman	52	52	100%
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	32	32	100%
4	Pengadilan Negeri Sawahlunto	2	2	100%
5	Pengadilan Negeri Payakumbuh	11	11	100%
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	9	9	100%
7	Pengadilan Negeri Batusangkar	14	14	100%
8	Pengadilan Negeri Solok	8	8	100%
9	Pengadilan Negeri Painan	16	16	100%
10	Pengadilan Negeri Padang Panjang	2	2	100%
11	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	13	13	100%
12	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	12	12	100%
13	Pengadilan Negeri Koto Baru	24	24	100%
14	Pengadilan Negeri Muaro	6	6	100%
15	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	13	13	100%
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	7	7	100%
	Jumlah	434	434	100%



B.2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu

Tabel. 13 Jumlah Perkara Perdata yang Diputus Tepat Waktu

NO	Pengadilan	Beban Perkara 2024	Putus Tepat Waktu 2024	Putus Tidak Tepat Waktu 2024	Jumlah Putus	Capaian Putus Tepat Waktu
1	Pengadilan Negeri Padang	942	578	156	734	79%
2	Pengadilan Negeri Pariaman	269	162	51	213	76%
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	199	115	42	157	73%
4	Pengadilan Negeri Sawahlunto	19	17	0	17	100%
5	Pengadilan Negeri Payakumbuh	135	119	3	122	98%
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	65	48	10	58	83%
7	Pengadilan Negeri Batusangkar	110	100	4	104	96%
8	Pengadilan Negeri Solok	107	107	3	110	97%
9	Pengadilan Negeri Painan	83	45	21	66	68%
10	Pengadilan Negeri Padang Panjang	43	37	2	39	95%
11	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	95	72	5	77	94%
12	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	75	71	0	71	100%
13	Pengadilan Negeri Koto Baru	98	75	14	89	84%
14	Pengadilan Negeri Muaro	59	53	0	53	100%
15	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	160	143	1	144	99%
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	60	54	0	54	100%
	Jumlah	2.519	1.796	312	2.108	85,20%



Tabel. 14 Jumlah Perkara Pidana yang Diputus Tepat Waktu

NO	Pengadilan	Beban Perkara 2024	Putus Tepat Waktu 2024	Putus Tidak Tepat Waktu 2024	Jumlah Putus	Capaian Putus Tepat Waktu
1	Pengadilan Negeri Padang	1.489	1.257	13	1.270	99%
2	Pengadilan Negeri Pariaman	389	271	0	271	100%
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	190	155	4	159	97%
4	Pengadilan Negeri Sawahlunto	50	43	0	43	100%
5	Pengadilan Negeri Payakumbuh	225	213	0	213	100%
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	98	83	0	83	100%
7	Pengadilan Negeri Batusangkar	141	136	0	136	100%
8	Pengadilan Negeri Solok	126	125	1	126	99%
9	Pengadilan Negeri Painan	199	172	0	172	100%
10	Pengadilan Negeri Padang Panjang	96	96	0	96	100%
11	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	163	151	0	151	100%
12	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	149	148	0	148	100%
13	Pengadilan Negeri Koto Baru	229	229	0	229	100%
14	Pengadilan Negeri Muaro	140	122	0	122	100%
15	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	252	232	0	232	54%
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	331	315	0	315	100%
	Jumlah	4.267	3.748	18	3.766	96,85%



Tabel. 15 Jumlah Perkara Pidana Lalu Lintas yang Diputus Tepat Waktu

NO	Pengadilan	Sisa 2023	Perkara Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa 2024	Capaian Memutus
1	Pengadilan Negeri Padang	0	17.689	17.689	17.689	0	100%
2	Pengadilan Negeri Pariaman	0	5.264	5.264	5.264	0	100%
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	0	4.279	4.279	4.279	0	100%
4	Pengadilan Negeri Sawahlunto	0	271	271	271	0	100%
5	Pengadilan Negeri Payakumbuh	0	1.601	1.601	1.601	0	100%
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	0	646	646	646	0	100%
7	Pengadilan Negeri Batusangkar	0	1.572	1.572	1.572	0	100%
8	Pengadilan Negeri Solok	0	2.436	2.436	2.436	0	100%
9	Pengadilan Negeri Painan	0	1.738	1.738	1.738	0	100%
10	Pengadilan Negeri Padang Panjang	0	1.208	1.208	1.208	0	100%
11	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	0	1.891	1.891	1.891	0	100%
12	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	0	895	895	895	0	100%
13	Pengadilan Negeri Koto Baru	0	2.050	2.050	2.050	0	100%
14	Pengadilan Negeri Muaro	0	612	612	612	0	100%
15	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	0	2.565	2.565	2.565	0	100%
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	0	589	589	589	0	100%
Total	Jumlah	0	45.306	45.306	45.306	0	100%

B.3. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Melalui Mediasi

Proses mediasi dalam penyelesaian perkara merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa melalui perundingan dengan bantuan mediator. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak untuk mencari solusi tanpa memaksakan penyelesaian. Dasar hukum mediasi di Indonesia adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini merupakan hasil revisi dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Berikut tabel mediasi perkara pada Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang.

Tabel 16. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil di Mediasi Tahun 2024

No	Satuan Kerja	Jumlah Perkara Perdata Masuk 2024	Status Keberhasilan Mediasi			Dalam Proses
			Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak dapat dilaksanakan	
1	Pengadilan Negeri Padang	260	11	138	-	206
2	Pengadilan Negeri Pariaman	109	11	77	2	6
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	75	-	52	7	6
4	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	61	1	19	6	1
5	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	50	2	23	-	3
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	23	1	15	1	2
7	Pengadilan Negeri Padang Panjang	17	-	17	-	-
8	Pengadilan Negeri Payakumbuh	-	-	-	-	-



9	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	25	3	22	-	-
10	Pengadilan Negeri Batusangkar	69	2	26	-	2
11	Pengadilan Negeri Painan	36	1	26	-	-
12	Pengadilan Negeri Koto Baru	39	5	30	1	4
13	Pengadilan Negeri Solok	33	0	33	-	-
14	Pengadilan Negeri Sawahlunto	4	2	2	-	-
15	Pengadilan Negeri Muaro	48	-	42	6	-
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	18	-	13	-	-
	TOTAL	867	39	535	23	230

B.4. Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi

Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif. Menurut PERMA 4 tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perawakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan.



Tabel 17. Jumlah Perkara Anak yang Berhasil di Diversi Tahun 2024

No	Satuan Kerja	Jumlah Perkara Pidana Anak TA. 2024	Status Keberhasilan Diversi			Dalam Proses
			Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	
1	Pengadilan Negeri Padang	65	-	7	-	-
2	Pengadilan Negeri Pariaman	-	-	-	-	-
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	4	2	2	-	-
4	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	3	-	1	-	-
5	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	-	-	-	-	-
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	-	-	-	-	-
7	Pengadilan Negeri Padang Panjang	4	-	4	-	-
8	Pengadilan Negeri Payakumbuh	-	-	-	-	-
9	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	6	-	6	-	-
10	Pengadilan Negeri Batusangkar	10	1	1	8	-
11	Pengadilan Negeri Painan	18	4	3	-	-
12	Pengadilan Negeri Koto Baru	12	4	-	-	-
13	Pengadilan Negeri Solok	7	2	1	2	-
14	Pengadilan Negeri Sawahlunto	-	-	-	-	-
15	Pengadilan Negeri Muaro	2	-	-	2	-
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	-	-	-	-	-
	TOTAL	131	13	25	12	0

C. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

C.1. Posbakum (Pos Bantuan Hukum)

Dasar hukum Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1 Tahun 2014. Peraturan ini mengatur pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan.

Tabel.18. Realisasi Anggaran Posbakum dan SidangKeliling di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang

NO	PENGADILAN	PAGU	REALISASI	SISA	CAPAIAN
1	Pengadilan Negeri Padang	44.000.000	44.000.000	0	100%
2	Pengadilan Negeri Pariaman	28.000.000	28.000.000	0	100%
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	44.000.000	44.000.000	0	100%
4	Pengadilan Negeri Sawahlunto	28.000.000	28.000.000	0	100%
5	Pengadilan Negeri Payakumbuh	28.000.000	28.000.000	0	100%
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	28.000.000	28.000.000	0	100%
7	Pengadilan Negeri Batusangkar	28.000.000	28.000.000	0	100%
8	Pengadilan Negeri Solok	28.000.000	28.000.000	0	100%
9	Pengadilan Negeri Painan	28.000.000	28.000.000	0	100%



10	Pengadilan Negeri Padang Panjang	28.000.000	28.000.000	0	100%
11	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	28.000.000	27.960.000	40.000	99,86%
12	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	28.000.000	27.960.000	40.000	99,86%
13	Pengadilan Negeri Koto Baru	28.000.000	27.600.000	400.000	98,57%
14	Pengadilan Negeri Muaro	28.000.000	27.907.200	92.800	99,67%
15	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	28.000.000	28.000.000	0	100%
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	28.000.000	28.000.000	0	100%
Total		480.000.000	479.427.200	572.800	99,88%

C.2. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu

NO	PENGADILAN	PAGU	REALISASI	SISA	CAPAIAN	JUMLAH SIDANG KELILING
1	Pengadilan Negeri Padang	-	-	-	-	
2	Pengadilan Negeri Pariaman	-	-	-	-	
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	-	-	-	-	
4	Pengadilan Negeri Sawahlunto	-	-	-	-	
5	Pengadilan Negeri Payakumbuh	-	-	-	-	
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	-	-	-	-	
7	Pengadilan Negeri Batusangkar	-	-	-	-	



8	Pengadilan Negeri Solok	-	-	-	-	
9	Pengadilan Negeri Painan	-	-	-	-	
10	Pengadilan Negeri Padang Panjang	-	-	-	-	
11	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	38.545.000	38.500.000	45.000	99,88%	35
12	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	76.555.000	76.555.000	0	100,00%	40
13	Pengadilan Negeri Koto Baru	89.500.000	88.770.000	730.000	99,18%	5
14	Pengadilan Negeri Muaro	-	-	-	-	-
15	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	39.616.000	39.616.000	0	100%	54
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	8.566.000	8.566.000	-	100%	10
	Total	252.782.000	252.007.000	775.000	99,69%	144

Tabel.19. Jumlah Perkara Prodeo dan Sidang Keliling
di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang

NO	PENGADILAN	PAGU	REALISASI	SISA	CAPAIAN	JUMLAH SIDANG KELILING
1	Pengadilan Negeri Padang	-	-	-	-	
2	Pengadilan Negeri Pariaman	-	-	-	-	
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	-	-	-	-	
4	Pengadilan Negeri Sawahlunto	-	-	-	-	
5	Pengadilan Negeri Payakumbuh	-	-	-	-	
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	-	-	-	-	
7	Pengadilan Negeri Batusangkar	-	-	-	-	



8	Pengadilan Negeri Solok	-	-	-	-	
9	Pengadilan Negeri Painan	-	-	-	-	
10	Pengadilan Negeri Padang Panjang	-	-	-	-	
11	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	38.545.000	38.500.000	45.000	99,88%	35
12	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	76.555.000	76.555.000	0	100,00%	40
13	Pengadilan Negeri Koto Baru	89.500.000	88.770.000	730.000	99,18%	5
14	Pengadilan Negeri Muaro	-	-	-	-	-
15	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	39.616.000	39.616.000	0	100%	54
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	8.566.000	8.566.000	-	100%	10
	Total	252.782.000	252.007.000	775.000	99,69%	144

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

A.MUTASI

B.PROMOSI

C.PENSIUN

**D.DIKLAT (SDM Teknis / Non
Teknis**

PENGADILAN TINGGI PADANG





BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia pada beberapa pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang pada tahun 2024 mengalami peningkatan baik dari segi jumlah maupun pengisian formasi jabatan setelah adanya perekrutan PPPK dan CPNS tahun 2023 serta mutasi dan promosi, namun masih ada Pengadilan Negeri yang mengalami kekosongan pada beberapa formasi jabatan dan kekurangan sumber daya manusia khususnya tenaga staf atau pelaksana. Berikut ini rincian sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Tinggi Padang dan Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2024. Jumlah Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tinggi Padang dapat dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 20. Data Pegawai Pengadilan Tinggi Padang

No	Nama	Pangkat / Gol	Jabatan	Pendidikan
	NIP			
1	Ade Komarudin, S.H., M.Hum.	Pembina Utama (IV/e)	Ketua	S-2 Magister Hukum
	195804221986011003			
2	Suwono, S.H., S.E., M.Hum.	Pembina Utama (IV/e)	Wakil Ketua	S-2 Magister Hukum
	196301011992121001			
3	Asmuddin, S.H., M.H.	Pembina Utama (IV/e)	Hakim Tinggi	S-2 Magister Hukum
	195809201985121001			
4	Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.	Pembina Utama (IV/e)	Hakim Tinggi	S-2 Magister Hukum
	195802131981031002			
5	Irwan Efendi, S.H., M.H.	Pembina Utama (IV/e)	Hakim Tinggi	S-2 Magister Hukum
	196012161988031002			
6	Masrizal, S.H., M.H.	Pembina Utama (IV/e)	Hakim Tinggi	S-2 Magister Hukum
	196111111988031004			
7	Rita Elsy, S.H., M.H.	Pembina Utama (IV/e)	Hakim Tinggi	S-2 Magister Hukum
	196310231989032002			
8	Yosdi, S.H.	Pembina Utama Madya (IV/d)	Hakim Tinggi	S-1 Ilmu Hukum
	196104101992121001			



9	Admiral, S.H., M.H. 196107171992121001	Pembina Utama Madya (IV/d)	Hakim Tinggi	S-2 Magister Hukum
10	Masrul, S.H., M.H. 196107141991031002	Pembina Utama (IV/e)	Hakim Tinggi	S-2 Magister Hukum
11	Jon Effreddi, S.H., M.H. 196404021985031005	Pembina Utama (IV/e)	Hakim Tinggi	S-2 Magister Hukum
12	Surachmat, S.H., M.H. 196303291987031005	Pembina Utama (IV/e)	Hakim Tinggi	S-2 Magister Hukum
13	Ida Ratnawati, S.H., M.H. 196706121992122001	Pembina Utama Madya (IV/d)	Hakim Tinggi	S-2 Magister Hukum
14	Heriyenti, S.H., M.H. 196712061992122001	Pembina Utama Madya (IV/d)	Hakim Tinggi	S-2 Magister Hukum
15	Lendrawati, S.H., M.Hum. -	-	Hakim Ad-Hoc Tipikor	S-2 Magister Hukum
16	Firdaus, S.H., M.Hum. -	-	Hakim Ad-Hoc Tipikor	S-2 Magister Hukum
17	Ahmad Dendy Syaifullah, S.H., M.H. -	-	Hakim Ad-Hoc Tipikor	S-2 Magister Hukum
18	R. Moch Chairael Fathah, S.H., M.Hum. 196611201991031002	Pembina Tk. I (IV/b)	Panitera	S-2 Magister Hukum
19	Endri Novian, S.E., M.M. 197511092003121001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Sekretaris	S-2 Magister Manajemen
20	Budiman, S.H. 197403271993031001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	S-1 Ilmu Hukum
21	Ade Candra, S.H. 198107222001121001	Pembina (IV/a)	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	S-1 Ilmu Hukum
22	Nurmaidaris, S.H. 196405251985032003	Pembina (IV/a)	Panitera Muda Pidana	S-1 Ilmu Hukum



23	Marhaban, S.H., M.H.	Pembina (IV/a)	Panitera Muda Khusus Tipikor	S-2 Magister Hukum
	197111101993031003			
24	Zulkifli, S.H.	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Muda Hukum	S-1 Ilmu Hukum
	196408121986031005			
25	Syalferri, S.H.	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Muda Perdata	S-1 Ilmu Hukum
	196603051992031005			
26	Aznel Mahendra, S.Si., M.H.	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Subbagian Rencana Program dan Anggaran	S-2 Magister Hukum
	198307042009121006			
27	Ayu Davmayanti, S.H.	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi	S-1 Ilmu Hukum
	198401232007042001			
28	Novita Sari, S.Kom.	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Subbagian Keuangan dan Pelaporan	S-1 Ilmu Komputer
	198611222009122004			
29	Suyono, S.H.	Penata (III/c)	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	S-1 Ilmu Hukum
	198007022009121002			
30	Lely Devita Roza, S.H., M.H.	Pembina (IV/a)	Panitera Pengganti	S-2 Magister Hukum
	196808031994032003			
31	Tutik Turyanawati, S.H., M.H.	Pembina (IV/a)	Panitera Pengganti	S-2 Magister Hukum
	196911121992032001			
32	Elizar, S.H., M.H.	Pembina (IV/a)	Panitera Pengganti	S-2 Magister Hukum
	197012251992032005			
33	Syafril, S.H., M.H.	Pembina (IV/a)	Panitera Pengganti	S-2 Magister Hukum
	196412101990031003			
34	Rinaldi, S.H., M.H.	Pembina (IV/a)	Panitera Pengganti	S-2 Magister Hukum
	197105011993031002			
35	Efendi, S.H.	Pembina (IV/a)	Panitera Pengganti	S-1 Ilmu Hukum
	196401191984021001			
36	Emmy Jefriati, S.H.	Penata Tk. I (III/d)		S-1 Ilmu Hukum



	196303241993032002		Panitera Pengganti	
37	Faisal, S.H.	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Pengganti	S-1 Ilmu Hukum
	196605121986031005			
38	Risnawati, S.H.	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Pengganti	S-1 Ilmu Hukum
	196312311985032036			
39	Desmawati, S.H.	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Pengganti	S-1 Ilmu Hukum
	196610101994032001			
40	Sri Hartini, S.Sos.	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Pengganti	S-1 Ilmu Sosial
	196404011986032005			
41	Alfian, S.H.	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Pengganti	S-1 Ilmu Hukum
	196710141993031003			
42	Fitriati, S.H.	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Pengganti	S-1 Ilmu Hukum
	196504131985032002			
43	Dasri, S.H.	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Pengganti	S-1 Ilmu Hukum
	196212101992031003			
44	Salpadin, S.H.	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Pengganti	S-1 Ilmu Hukum
	196212311985031061			
45	Refyna Sumita, S.E.	Penata Tk. I (III/d)	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	S-1 Ilmu Ekonomi
	198503052011012016			
46	Tessya Putri Permata Sari, S.E., M.Si.	Penata (III/c)	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	S-2 Magister Sains
	198903272015032010			
47	Dona Vivironika, S.E.	Penata Muda Tk. I (III/b)	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	S-1 Ilmu Ekonomi
	198908092015032003			
48	Niko Rinaldi, S.I.P.	Penata Muda Tk. I (III/b)	Analisis Sumber Daya Manusia	S-1 Ilmu Politik
	198710232019031005			



			Aparatur Ahli Pertama	
49	Mardhiyah, S.A.P.	Penata Muda Tk. I (III/b)	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S-1 Administrasi Publik
	199306302019032013			
50	Mai Fitri Yadi, S.Kom.	Penata Muda Tk. I (III/b)	Perencana Ahli Pertama	S-1 Ilmu Komputer
	198805192011011005			
51	Nabilah Jasmine, S.Kom.	Penata Muda (III/a)	Pranata Komputer Ahli Pertama	S-1 Ilmu Komputer
	199602042020122007			
52	Yurmanto, S.H.	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pranata Keuangan APBN Mahir	S-1 Ilmu Hukum
	198705032006041003			
53	Ameliza, S.H.	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pranata Keuangan APBN Mahir	S-1 Ilmu Hukum
	198805292011012019			
54	Stri Devi Saraswati, A.Md.S.I.	Pengatur Tk. I (II/d)	Arsiparis Terampil	D-3 Sains Informasi
	199712222020122001			
55	Apedisnita, S.H., M.H.	Pembina Tk. I (IV/b)	Klerik - Analisis Perkara Peradilan	S-2 Magister Hukum
	196703131993082001			
56	Haviza M., S.H.	Penata Tk. I (III/d)	Klerik - Analisis Perkara Peradilan	S-1 Ilmu Hukum
	197103131993032001			
57	Muriati, S.H.	Penata Muda Tk. I (III/b)	Klerik - Analisis Perkara Peradilan	S-1 Ilmu Hukum
	197609132003032001			
58	Yolanda Sari, S.H.	Penata Muda Tk. I (III/b)	Klerik - Analisis Perkara Peradilan	S-1 Ilmu Hukum
	198104222009042005			
59	Notri Lidia, S.H.I.	Penata Muda Tk. I (III/b)	Klerik - Analisis Perkara Peradilan	S-1 Ilmu Hukum Islam
	198611182019032003			
60	Mirna Desrita, S.H.	Penata Muda (III/a)	Klerik - Analisis Perkara Peradilan	S-1 Ilmu Hukum
	199912052024052001			
61	Nabila Hanindiaz, S.H.	Penata Muda (III/a)	Klerik - Analisis Perkara Peradilan	S-1 Ilmu Hukum
	199907302024052001			
62	Frengki Jerri Putra, S. Pd	Penata (III/c)		S-1 Ilmu Pendidikan



	198601272010011010		Operator - Penata Layanan Operasional	
63	Reflison Augusto, S.Kom.	Penata Muda (III/a)	Operator - Penata Layanan Operasional	S-1 Ilmu Komputer
	198808262015031002			
64	Suci Khairun Nisaa, S.AP	Penata Muda (III/a)	Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 Administrasi Publik
	199411212022032017			
65	Mai Ratna Juita, A.Md.AB.	Pengatur (II/c)	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara	D-3 Administrasi Bisnis
	199705132022032016			
66	Rima Novika, A.Md.AB.	Pengatur (II/c)	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara	D-3 Administrasi Bisnis
	199511122022032017			
67	Dhebbie Sintia Putri, A.Md.AB.	Pengatur (II/c)	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara	D-3 Administrasi Bisnis
	199705302022032012			
68	Muhammad Asher Rahman, A.Md.	Pengatur Tk. I (II/d)	Klerek - Pengolah Data dan Informasi	D-3 Akuntansi
	199602272020121005			
69	Alfi Anrico, S.H.	Penata Muda Tk. I (III/b)	Klerek - Pengadministrasi Perkantoran	S-1 Ilmu Hukum
	198504012012121008			
70	Hendra Prasetyo Budi	Pengatur (II/c)	Klerek - Pengadministrasi Perkantoran	SMA/SMK Sederajat
	198310242012121003			
71	Rika Syafnita Putri, S.E.	IX (IX)	PPPK Perencana Ahli Pertama	S-1 Ilmu Ekonomi
	199701082023212017			
72	Indah Kemala Fatwa, S.A.P.	IX (IX)	PPPK Arsiparis Ahli Pertama	S-1 Administrasi Publik
	199512262023212025			
73	Arief Adrian, S.H., M.H	-	PPNPN	S-2 Magister Hukum
74	Yuli Fitriani, S.H.	-	PPNPN	S-1 Ilmu Hukum



75	Rika Maria Sarie, S.H.	-	PPNPN	S-1 Ilmu Hukum
76	Satria Gautama, S.H.	-	PPNPN	S-1 Ilmu Hukum
77	Musnadi, S.T., S.H.	-	PPNPN	S-1 Ilmu Hukum
78	Reri Arianto, S.Kom	-	PPNPN	S-1 Ilmu Komputer
79	Yunihar, S.Sos.I	-	PPNPN	S-1 Ilmu Sosial Islam
80	Syafriadi, S.H.	-	PPNPN	S-1 Ilmu Hukum
81	Ismet Mulyadi, A.Md.	-	PPNPN	D-3 Teknik
82	Nola Yusel Fatria, A.Md.Keb.	-	PPNPN	D-3 Kebidanan
83	Oktaviandi	-	PPNPN	SMA/SMK Sederajat
84	Eka Gusyandi	-	PPNPN	SMA/SMK Sederajat
85	Dedi Hermanto	-	PPNPN	SMA/SMK Sederajat
86	Aditya Sanjaya	-	PPNPN	SMA/SMK Sederajat
87	Suhar Wance	-	PPNPN	SMA/SMK Sederajat
88	Iskandar Rafles	-	PPNPN	SMA/SMK Sederajat
89	Fauzan Nasution	-	PPNPN	SMA/SMK Sederajat
90	Ulvi Ade Putra	-	PPNPN	SMA/SMK Sederajat
91	Nofrinaldo	-	PPNPN	SMA/SMK Sederajat
92	Andy	-	PPNPN	SMA/SMK Sederajat



No	Satker	Ketua	Wakil Ketua	Hakim	Kepaniteraan							Keseekretariatan						
					Panitera	Panmud	PP	JS	JSP	Staff	PPPK	Sekretaris	Kabag	Kasub	Fungsional	Staff	PPPK	PPNPN
1	Pengadilan Tinggi Padang	1	1	15	1	4	15	-	-	10	1	1	2	4	10	6	20	1
2	Pengadilan Negeri Padang	1	1	21	1	5	7	3	10	14	0	1	0	3	4	4	1	19
3	Pengadilan Negeri Pariaman	1	1	5	1	3	3	2	1	6	0	1	0	2	3	3	1	8
4	Pengadilan Negeri Bukittinggi	1	1	3	1	3	4	3	0	5	0	1	0	3	1	3	1	11
5	Pengadilan Negeri Sawahlunto	1	1	6	1	3	1	1	0	2	0	1	0	3	2	1	0	9
6	Pengadilan Negeri Payakumbuh	1	1	8	1	3	3	1	1	3	0	1	0	3	2	2	0	9
7	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	1	0	5	1	3	1	2	1	3	0	1	0	3	2	0	0	9
8	Pengadilan Negeri Batusangkar	1	1	7	1	2	1	2	0	2	0	1	0	3	1	0	0	10
9	Pengadilan Negeri Solok	1	1	4	1	2	1	0	0	3	0	1	0	3	3	0	0	10
10	Pengadilan Negeri Painan	1	1	6	1	3	2	0	0	4	0	1	0	3	2	1	0	11



11	Pengadilan Negeri Padang Panjang	1	1	4	1	3	3	1	0	3	0	1	0	3	2	2	0	8
12	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	1	1	5	1	3	2	1	1	3	0	1	0	3	0	1	1	10
13	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	1	1	5	1	2	1	0	3	4	0	1	0	3	2	0	0	9
14	Pengadilan Negeri Koto Baru	1	0	5	1	2	2	0	0	3	0	1	0	3	1	0	0	9
15	Pengadilan Negeri Muaro	1	0	5	1	2	2	0	0	3	0	1	0	3	1	0	0	9
16	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	1	1	8	11	1	2	1	0	3	0	1	0	3	4	1	0	9
17	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	1	1	6	1	2	2	0	1	3	0	1	0	2	0	2	0	8
Total																		



A. MUTASI

Tabel 21. Data Mutasi pada Satuan Kerja Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang

NO	SATUAN KERJA	MUTASI MASUK	MUTASI KELUAR	KETERANGAN
1	Pengadilan Tinggi Padang	8	9	
2	Pengadilan Negeri Padang	11	5	
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	7	12	
4	Pengadilan Negeri Pariaman	0	0	
5	Pengadilan Negeri Sawahlunto	1	1	
6	Pengadilan Negeri Payakumbuh	1	3	
7	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	3	5	
8	Pengadilan Negeri Batusangkar	0	1	
9	Pengadilan Negeri Solok	2	7	
10	Pengadilan Negeri Painan	1	5	
11	Pengadilan Negeri Padang Panjang	2	4	
12	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	2	3	
13	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	1	2	
14	Pengadilan Negeri Koto Baru	4	7	
15	Pengadilan Negeri Muaro	5	6	
16	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	4	7	
17	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	0	1	
Total		52	78	



B. PROMOSI

Tabel 22. Data Promosi pada Satuan
Kerja Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi
Padang

NO	SATUAN KERJA	MASUK	KELUAR	KETERANGAN
1	Pengadilan Tinggi Padang	5	1	
2	Pengadilan Negeri Padang	3	5	
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	4	8	
4	Pengadilan Negeri Pariaman	5	4	
5	Pengadilan Negeri Sawahlunto	0	1	
6	Pengadilan Negeri Payakumbuh	0	0	
7	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	4	0	
8	Pengadilan Negeri Batusangkar	3	1	
9	Pengadilan Negeri Solok	1	1	
10	Pengadilan Negeri Painan	3	0	
11	Pengadilan Negeri Padang Panjang	2	3	
12	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	2	3	
13	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	4	4	
14	Pengadilan Negeri Koto Baru	4	1	
15	Pengadilan Negeri Muaro	4	3	
16	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	4	6	
17	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	1	3	
Total		49	44	



C. Pensiun

Tabel 23. Data Pensiun pada Satuan Kerja
Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang

NO	SATUAN KERJA	JABATAN	JUMLAH (Orang)
1	Pengadilan Tinggi Padang	- Ketua - Hakim Tinggi - Panitera - Panitera Muda Khusus Tipikor - Panitera Pengganti	1 1 1 1 6
2	Pengadilan Negeri Padang	- Sekretaris - Juru Sita Pengganti - Panitera Pengganti	1 1 4
3	Pengadilan Negeri Pariaman	-	
4	Pengadilan Negeri Bukittinggi	-	
5	Pengadilan Negeri Sawahlunto	-	
6	Pengadilan Negeri Payakumbuh	Panitera Pengganti	1
7	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	-	
8	Pengadilan Negeri Batusangkar	Panitera Pengganti	1
9	Pengadilan Negeri Solok	- Arsiparis Terampil - Juru Sita	1 1
10	Pengadilan Negeri Painan	-	
11	Pengadilan Negeri Padang Panjang	Panitera Muda Perdata	1
12	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	-	
13	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	Panitera Pengganti	1



		• Panitera Muda Perdata • Juru Sita	• 1 • 1
14	Pengadilan Negeri Koto Baru	-	
15	Pengadilan Negeri Muaro	-	
16	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	-	
17	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	-	
Total			24 Orang

D. DIKLAT TEKNIS DAN NON TEKNIS

Tabel. 24 Data Diklat Teknis dan Non Teknis pada Satuan Kerja Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang

No	Satuan Kerja	Jumlah Hakim Dan Pegawai Yang Mengikuti Diklat Teknis	Jumlah Hakim Dan Pegawai Yang Mengikuti Diklat Non Teknis
1	Pengadilan Tinggi Padang	4	7
2	Pengadilan Negeri Padang	36	15
3	Pengadilan Negeri Pariaman	6	0
4	Pengadilan Negeri Bukittinggi	4	4
5	Pengadilan Negeri Sawahlunto	3	2
6	Pengadilan Negeri Payakumbuh	2	2
7	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	5	0
8	Pengadilan Negeri Batusangkar	4	3
9	Pengadilan Negeri Solok	6	4
10	Pengadilan Negeri Painan	2	1
11	Pengadilan Negeri Padang Panjang	3	0



12	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	2	1
13	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	10	3
14	Pengadilan Negeri Koto Baru	3	3
15	Pengadilan Negeri Muaro	4	2
16	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	2	3
17	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	3	2



BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) terdapat 3 (tiga) program:

1. Program Dukungan Manajemen (DIPA 01 BUA)
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (DIPA 03 BADILUM)

Realisasi anggaran Pengadilan Tinggi Padang dan Pengadilan Negeri Sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel - tabel berikut:

1. REALISASI DIPA 01

Tabel 25. Realisasi DIPA 01

No	Satker	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
				Rp	%	Rp	%
1	Pengadilan Tinggi Padang	Belanja Pegawai	16.273.117.000	16.180.590.333	99,43%	92.526.667	0,57%
		Belanja Barang	3.485.695.000	3.483.242.414	99,93%	2.452.586	0,07%
		Belanja Modal	4.022.812.000	4.006.041.578	99,58%	16.770.422	0,42%
		TOTAL	23.781.624.000	23.669.874.325	99,53%	111.749.675	0,47%
2	Pengadilan Negeri Padang	Belanja Pegawai	11.802.423.000	11.722.586.051	99,32%	79.836.949	0,68%
		Belanja Barang	3.238.020.000	3.234.641.190	99,90%	3.378.810	0,10%
		Belanja Modal					
			15.040.443.000	14.957.227.241	99,45%	83.215.759	0,55%
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	Belanja Pegawai	4.267.019.000	4.148.003.564	97,21%	119.015.436	2,79%
		Belanja Barang	1.469.051.000	1.466.982.413	99,86%	2.068.587	0,14%



		Belanja Modal	-	-	-	-	-
			5.736.070.000	5.614.985.977	97.89%	121.084.023	2.11%
4	Pengadilan Negeri Pariaman	Belanja Pegawai	4.364.892.000	4.020.445.934	92.11%	344.446.	7.89%
		Belanja Barang	1.344.901.000	1.344.814.951	99.99%	86.049	0.01%
		Belanja Modal	-	-	-	-	-
			5.709.793.000	5.365.260.885	93.97%	344.532.115	6.03%
5	Pengadilan Negeri Sawahlunto	Belanja Pegawai	2.946.949.000	2.943.108.192	99.87%	3.840.808	0.13%
		Belanja Barang	1.184.301.000	1.183.357.826	99.92%	943.174	0.08%
		Belanja Modal	-	-	-	-	-
			4.131.250.000	4.126.466.018	99.88%	4.783.982	0.12%
6	Pengadilan Negeri Payakumbuh	Belanja Pegawai	3.739.236.000	3.738.781.720	99.99%	454.280	0.01%
		Belanja Barang	1.057.431.000	1.057.003.507	99.96%	427.493	0.04%
		Belanja Modal	-	-	-	-	-
			4.796.667.000	4.795.785.227	99.98%	881.773	0.02%
7	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	Belanja Pegawai	2.949.766.000	2.934.762.804	99.49%	15.003.196	0.51%
		Belanja Barang	1.229.143.000	1.222.352.195	99.45%	6.790.805	0.55%
		Belanja Modal	-	-	-	-	-
			4.178.909.000	4.157.114.999	99.48%	21.794.001	0.52%
8		Belanja Pegawai	3.189.335.000	3.105.178.338	97.36%	84.156.662	2.64%



	Pengadilan Negeri Batusangkar	Belanja Barang	1.281.902.000	1.280.552.245	99.89%	1.349.755	0.11%
		Belanja Modal	-	-	-	-	-
			4.471.237.000	4.385.730.583	98.09%	85.506.417	1.91%
9	Pengadilan Negeri Solok	Belanja Pegawai	3.087.955.000	3.069.832.738	99.41%	18.122.262	0.59%
		Belanja Barang	1.182.064.000	1.158.009.581	97.97%	24.054.419	2.03%
		Belanja Modal	-	-	-	-	-
			4.270.019.000	4.227.842.319	99.01%	42.176.681	0.99%
10	Pengadilan Negeri Painan	Belanja Pegawai	2.865.748.000	2.755.906.968	96.17%	109.841.032	3.83%
		Belanja Barang	1.419.368.000	1.414.733.806	99.67%	4.634.194	0.33%
		Belanja Modal	780.000.000	773.610.508	99.18%	6.389.492	0.82%
			5.065.116.000	4.944.251.282	97.61%	120.864.718	2.39%
11	Pengadilan Negeri Padang Panjang	Belanja Pegawai	3.050.064.000	2.922.237.475	95.81%	127.826.525	4.19%
		Belanja Barang	1.300.016.000	1.252.844.599	96.37%	47.171.401	3.63%
		Belanja Modal	-	-	-	-	-
			4.350.080.000	4.175.082.074	95.98%	174.997.926	4.02%
12	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	Belanja Pegawai	2.934.654.000	2.925.493.888	99.69%	9.160.112	0.31%
		Belanja Barang	1.475.375.000	1.470.258.187	99.65%	5.116.813	0.35%
		Belanja Modal	36.500.000	36.500.000	100%	0	0%



13	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	Belanja Pegawai	2.988.157.000	2.987.669.892	99.98%	487.108	0.02%
		Belanja Barang	1.207.448.000	1.200.944.281	96.46%	6.503.719	0.54%
		Belanja Modal	-	-	-	-	-
			4.195.605.000	4.188.614.173	99.83%	6.990.827	0.17%
14	Pengadilan Negeri Koto Baru	Belanja Pegawai	3.048.701.000	2.903.004.552	95.22%	145.696.448	5.02%
		Belanja Barang	1.249.574.000	1.241.967.639	99.39%	7.606.361	0.61%
		Belanja Modal	401.040.000	395.900.000	98.72%	5.140.000	1.30%
			4.699.315.000	4.540.872.191	97.78%	158.442.809	2.31%
15	Pengadilan Negeri Muaro	Belanja Pegawai	2.641.771.000	2600.904.301	98.45%	40.866.699	1.55%
		Belanja Barang	1.195.695.000	1.159.197.972	96.95%	36.497.028	3.05%
		Belanja Modal	-	-	-	-	-
			3.837.466.000	3.760.102.273	97.98%	77.363.727	2.02%
16	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	Belanja Pegawai	3.515.927.000	3.512.446.568	99.90%	3.480.432	0.1%
		Belanja Barang	1.406.596.000	1.406.458.955	99.99%	137.045	0.01%
		Belanja Modal	50.000.000	49.999.950	100%	50	-
		TOTAL	4.972.523.000	4.968.905.473	99.93%	3.617.527	0.07%
17	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	Belanja Pegawai	3.023.786.000	3.017.078.403	99.78%	6.707.597	0.22%
		Belanja Barang	1.087.188.000	1.087.126.976	99.99%	61.024	0.01%



		Belanja Modal	-	-	-	-	-
			4.110.974.000	4.104.205.379	99.84%	6.768.621	0.16%



2. REALISASI DIPA 03

Tabel 26. Realisasi DIPA 03

No	Satker	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
				Rp	%	Rp	%
1	Pengadilan Tinggi Padang	Belanja Barang	328.043.000	311.825.600	95,06%	16.217.400	4,94%
2	Pengadilan Negeri Padang	Belanja Barang	489.579.000	484.660.500	99%	4.918.500	1%
3	Pengadilan Negeri Pariaman	Belanja Barang	219.900.000	219.889.560	100%	10.440	0%
4	Pengadilan Negeri Bukittinggi	Belanja Barang	116.850.000	116.759.500	99,92%	90.500	0,08%
5	Pengadilan Negeri Sawahlunto	Belanja Barang	53.526.000	53.488.500	99,93%	37.500	0,07%
6	Pengadilan Negeri Payakumbuh	Belanja Barang	99.240.000	98.043.780	98,79%	1.196.220	1,21%
7	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	Belanja Barang	67.900.000	67.900.000	100%	0	0%
8	Pengadilan Negeri Batusangkar	Belanja Barang	89.500.000	89.362.800	99,85%	137.200	0,2%
9	Pengadilan Negeri Solok	Belanja Barang	63.410.000	63.174.310	99,63%	235.690	0,37%
10	Pengadilan Negeri Painan	Belanja Barang	106.700.000	88.520.185	82,96%	18.179.815	17,04%
11	Pengadilan Negeri Padang Panjang	Belanja Barang	52.000.000	51.716.090	99,45%	283.910	0,55%
12	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	Belanja Barang	126.627.000	125.100.660	98,79%	1.526.340	1,21%
13	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	Belanja Barang	152.675.000	152.619.320	99,96%	55.680	0,04%
14	Pengadilan Negeri Koto Baru	Belanja Barang	159.900.000	158.501.700	99,27%	1.398.300	0,73%
15	Pengadilan Negeri Muaro	Belanja Barang	72.680.000	73.349.200	99,54%	330.800	0,46%
16	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	Belanja Barang	143.616.000	143.616.000	100%	-	-
17	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	Belanja Barang	89.086.000	85.433.190	95,90%	3.652.810	4,10%



B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Tabel 27. Tabel Sarana Dan Prasarana Kantor

NO	SARANA/PRASARANA	JUMLAH
1	PENGADILAN TINGGI PADANG	
	Sarana Prasarana Gedung	
1	Ruang Ketua	1
2	Ruang Wakil Ketua	1
3	Ruang Hakim	4
4	Ruang Panitera	1
5	Ruang Sekretaris	1
6	Ruang Sidang Utama	1
7	Ruang Sidang umum	1
8	Ruang Kepaniteraan Pidana	1
9	Ruang Kepaniteraan Perdata	1
10	Ruang Kepaniteraan Hukum	1
11	Ruang Kepaniteraan Tipikor	1
12	Ruang Panitera Pengganti	1
13	Ruang Kepegawaian dan Perencanaan	1
14	Ruang Umum dan Keuangan	1
15	Ruang Server	1
16	Ruang Kasub Umum	1
17	Ruang Kasub Kepegawaian, Ortala	1
18	Ruang Kasub Perencanaan, TI dan Pelaporan	1
19	Ruang Perpustakaan	1
20	Ruang Arsip	2
21	Toilet	10
22	Toilet Difable	1
23	Mushola	1
24	Tempat Wudhuk	1



25	Ruang Penyimpanan	2
26	Aula	1
27	Ruang Tunggu PTSP	1
28	Ruang Tunggu Terbuka	1
29	Ruang PTSP	1
30	Ruang Rapat	1
31	Ruang Tamu Ketua dan Ajudan	1
32	Ruang Istirahat Ketua	1
33	Ruang Istirahat Wakil Ketua	1
34	Ruang Istirahat Security	1
Sarana Prasarana Fasilitas Perkantoran		
1	PLN	1
2	PDAM	1
3	Kendaraan Roda 4	5
4	Kendaraan Roda 4 (Sewa)	3
5	Kendaraan Roda 2	7
6	Pc	68
7	Laptop	32
8	Printer	29
9	Ac	63
10	Genset	1
11	Mesin Fotocopy (Sewa)	1
2	PENGADILAN NEGERI PADANG	
Sarana Fasilitas Gedung		
1	Ruang Ketua	1
2	Ruang Wakil Ketua	1
3	Ruang Hakim	3
4	Ruang Panitera	1
5	Ruang Sekretaris	1
6	Ruang Sidang Utama	1
7	Ruang Sidang umum	6
8	Ruang Sidang Anak	1
9	Ruang Kepaniteraan Pidana	1
10	Ruang Kepaniteraan Perdata	1



11	Ruang Kepaniteraan Hukum	1
12	Ruang Kepaniteraan PHI	1
13	Ruang Kepaniteraan Tipikor	1
14	Ruang Panitera Pengganti	2
15	Ruang Jurusita	1
16	Ruang Kepegawaian, Ortala gabung dengan Ruang Perencanaan, TI dan Pelaporan	1
17	Ruang Umum dan Keuangan	1
18	Ruang Server	1
19	Ruang Panmud Pidana	1
20	Ruang Panmud Perdata	1
21	Ruang Panmud Hukum	1
22	Ruang Panmud PHI	1
23	Ruang Panmud Tipikor	1
24	Ruang Kasub Umum	1
25	Ruang Kasub Kepegawaian, Ortala	1
26	Ruang Kasub Perencanaan, TI dan Pelaporan	1
27	Ruang Bendahara	1
28	Ruang Mediasi	1
29	Ruang Kaukus	1
30	Ruang Perpusakaan	1
31	Ruang Arsip	3
32	Ruang Jaksa	1
33	Ruang Polisi	1
34	Ruang Posbakum	1
35	Ruang Advokat/ Pengacara	1
36	Ruang Tahanan	5
37	Ruang Penjaga Tahanan	2
38	Ruang Barang Bukti	1
39	Ruang Laktasi	1
40	Ruang Teleconference	1
41	Ruang Control Audio	1
42	Ruang ATK	1
43	Ruang M.E	2
44	Toilet	18



45	Toilet Difable	2
46	Mushola	1
47	Tempat Wudhuk	1
48	Ruang Penyimpanan	4
49	Aula	1
50	Ruang Tunggu PTSP	1
51	Ruang Tunggu Terbuka	2
52	Ruang Tunggu Anak	1
53	Ruang PTSP	1
54	Ruang Kasir	1
55	Ruang Rapat	2
56	Ruang Tamu Ketua dan Ajudan	1
57	Ruang Makan Hakim	1
58	Ruang Istirahat Ketua	1
59	Ruang Istirahat Wakil Ketua	1
60	Ruang Istirahat Security	1
Sarana Prasarana Fasilitas Perkantoran		
1	Kursi Roda	2
2	Termometer Governmen Tester 0 Derajat Sampai Dengan 100 Derajat C	3
3	Loup	1
4	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	2
5	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	5
6	Mesin Penghitung Uang	1
7	Mesin Fotocopy Electronic	2
8	Lemari Besi/Metal	15
9	Lemari Kayu	144
10	Rak Besi	1
11	Rak Kayu	39
12	Filing Cabinet Besi	15
13	Filing Cabinet Kayu	4
14	Brandkas	5
15	Mobile File	4
16	CCTV - Camera Control Television System	3
17	Papan Visual/Papan Nama	9



18	White Board	20
19	Mesin Absensi	2
20	LCD Projector/Infocus	1
21	Panic Button System, Alarm Indicator	1
22	Mesin Antrian	1
23	Tongkat Pedel	16
24	Perkakas Kantor Lainnya	8
25	Alat Kantor Lainnya	6
26	Meja Kerja Kayu	183
27	Kursi Besi/Metal	565
28	Kursi Kayu	114
29	Sice	19
30	Bangku Panjang Besi/Metal	8
31	Bangku Panjang Kayu	71
32	Meja Rapat	50
33	Meja Komputer	13
34	Meja Telepon	1
35	Meja Resepsionis	2
36	Kasur/Spring Bed	3
37	Kursi Fiber Glas/Plastik	13
38	Partisi	2
39	Nakas	3
40	Cubikal	18
41	Sofa	8
42	Jam Elektronik	17
43	A.C. Window	2
44	A.C. Split	38
45	Kipas Angin	27
46	Televisi	8
47	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	1
48	Loudspeaker	10
49	Sound System	3
50	Wireless	1
51	Microphone	7
52	Mic Conference	1



53	Lambang Garuda Pancasila	4
54	Gambar Presiden/Wakil Presiden	2
55	Tiang Bendera	17
56	Kaca Hias	5
57	Dispenser	2
58	Mimbar/Podium	2
59	Palu Sidang	4
60	Lambang Instansi	1
61	Karpet	4
62	Kabel Roll	1
63	Bracket Standing Peralatan	1
64	Audio Mixing Console	3
65	Audio Visual	1
66	Microphone/Wireless MIC	15
67	Uninterruptible Power Supply (UPS)	15
68	Head Set	1
69	Camera Digital	1
70	LCD Monitor	1
71	Camera Conference	2
72	Pesawat Telephone	22
73	Handy Talky (HT)	10
74	Facsimile	3
75	Finger Printer Time and Attandance Acces Control System	3
76	Network Monitoring System	1
77	Switcher Combination	7
78	Genset	1
79	Internet	1
80	Komputer Jaringan Lainnya	1
81	P.C Unit	127
82	Lap Top	45
83	Monitor	4
84	Printer (Peralatan Personal Komputer)	70
85	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	12
86	Server	4
87	Router	2



88	Hub	2
89	Rak Server	1
90	Kabel UTP	3
91	Wireless IP Camera	2
3	PENGADILAN NEGERI PARIAMAN	
	Sarana/Prasarana Gedung	
1	Ruang Ketua	1
2	Ruang Wakil Ketua	1
3	Ruang Hakim	1
4	Ruang Panitera	1
5	Ruang Sekretaris	1
6	Ruang Sidang Umum	3
7	Ruang Sidang Anak	1
8	Ruang Mediasi	1
9	Ruang Kepaniteraan Pidana	1
10	Ruang Kepaniteraan Perdata	1
11	Ruang Kepaniteraan Hukum	1
12	Ruang Kepaniteraan	1
13	Ruang Bag. Perencanaan, IT dan Pelaporan	1
14	Ruang Kepegawaian, Ortala	1
15	Ruang Umum dan Keuangan	1
16	Ruang Server	1
17	Ruang Posbakum	1
18	Ruang Perpustakaan	1
19	Ruang Arsip	1
20	Ruang Jaksa	1
21	Ruang Polisi	1
22	Ruang Pengacara	1
23	Ruang Tahanan	4
24	Ruang Barang Bukti	1
25	Ruang Laktasi	1
26	Toilet Ketua	1
27	Toilet Wakil Ketua	1
28	Toilet Hakim	2
29	Toilet Panitera	1



30	Toilet Sekretaris	1
31	Toilet Pegawai	4
32	Toilet Umum	4
33	Toilet Tahanan	2
Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran		
1	Videoscope With Side Band Adaptor	1
2	Scanner (Universal Tester)	2
3	Neraca Percisi (Elektronik Vacum Me)	1
4	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	2
5	Mesin Fotocopy Electronic	1
6	Lemari Kayu	35
7	Filling Cabinet Besi	8
8	Barndkas	3
9	Tabung Pemadam Api	7
10	CCTV	10
11	Papan Nama/Papan Visual	23
12	White Board	9
13	Mesin Absensi	2
14	Perkakas Kantor Lainnya	35
15	Meja Kerja Kayu	99
16	Kursi Besi/Metal	309
17	Kursi Kayu	33
18	Sice	9
19	Bangku Panjang Besi/Metal	4
20	Bangku Panjang Kayu	43
21	Meja Komputer	5
22	Meja Resepsionis	2
23	Partisi	2
24	Jam Elektronik	8
25	Mesin Pemotong Rumput	1
26	AC Window	8
27	AC Split	17
28	Kipas Angin	5
29	Televisi	4



30	Amplifier	1
31	Loudspeaker	1
32	Sound System	4
33	Megaphone	1
34	Microphone	1
35	Microphone Table Stand	1
36	Mic Conference	5
37	Lambang Garuda Pancasila	4
38	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1
39	Tiang Bendera	6
40	Kaca Hias	4
41	Palu Sidang	4
42	Lambang Instansi	2
43	Vertical Blind	225
44	Intercom Unit	3
45	Uninterruptible Power Suply (UPS)	6
46	LCD Monitor	1
47	Pesawat Telephone	1
48	Facsimile	1
49	Genset	1
50	Internet	1
51	Komputer Jaringan Lainnya	1
52	P.C. Unit	30
53	Lap Top	16
54	Note Book	2
55	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1
56	Printer (Peralatan Personal Komputer)	30
57	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	7
58	Server	1
59	Router	1
60	Alat Tennis Meja	1
61	Monografi	13
62	Kios K	1



4	PENGADILAN NEGERI BUKITINGGI	
	Sarana/Prasarana Gedung	
1	Ruang Ketua	1
2	Ruang Wakil Ketua	1
3	Ruang Hakim	2
4	Ruang Panitera	1
5	Ruang Sekretaris	1
6	Ruang Sidang Umum	2
7	Ruang Sidang Anak	1
8	Ruang Tahanan	3
9	Ruang Kepaniteraan	3
10	Ruang Kesekretariatan	3
11	Ruang PTSP	1
12	Ruang Mediasi	1
13	Ruang Perpustakaan	1
14	Mushalla	1
15	Kantin	1
16	Ruang Arsip	1
17	Gudang	3
18	Garasi Mobil	2
19	Lapangan Tenis	1
20	Toilet	6
	Sarana Prasarana Fasilitas Perkantoran	
1	Komputer	50
2	Laptop	18
3	Server	2
4	Infokus	1
5	PABX	1
6	Mesin Fotocopy	1
7	AC Split	5
8	Printer	35
9	Scanner	10
10	Facsimile	1
11	Genset	2



12	UPS	12
5	PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG	
	Sarana/Prasarana Gedung	
1	Ruang Ptsp	1
2	Tuang Sidang Umum	2
3	Ruang Sidang Anak	1
4	Ruang Mediasi, Diversi, Kaukus	1
5	Ruang Tunggu Sidang	1
6	Ruang Tahanan	1
7	Ruang Jaksa	1
8	Ruang Posbakum	1
9	Ruang Ramah Anak Dan Laktasi	1
10	Ruang Klinik Kesehatan	1
11	Toilet	13
12	Ruang Kerja	10
13	Ruang Pustaka	1
14	Ruang Dharmayukti Karini	1
15	Ruang Rapat	1
16	Ruang Arsip	1
17	Ruang Gudang	2
18	Mushola	1
19	Ruang Server	1
	Sarana Prasarana Fasilitas Perkantoran	
1	P.C Unit	40
2	Lap Top	27
3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	29
4	Rak Server	1
5	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	7
6	Server	2
7	Tablet PC	1
8	Internet	1
9	Komputer Jaringan Lainnya	1
10	A.C. Split	19
11	Amplifier	1
12	Audio Mixing Console	1



13	Bangku Panjang Kayu	8
14	Bracket Standing Peralatan	1
15	Brandkas	2
16	Camera Conference	1
17	CCTV - Camera Control Television System	5
18	Dispenser	6
19	Filing Cabinet Besi	7
20	Kipas Angin	12
21	Kursi Besi/Metal	80
22	Kursi Kayu	2
23	LCD Monitor	1
24	LCD Projector/Infocus	1
25	Lemari Kayu	14
26	Loudspeaker	6
27	Meja Kerja Kayu	49
28	Meja Komputer	5
29	Meja Rapat	10
30	Microphone	9
31	Rak Besi	8
32	Sice	3
33	Televisi	5
34	Uninterruptible Power Supply (UPS)	5
6	PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT	
	Sarana/Prasarana Gedung	
1	Ruang Ketua	1
2	Ruang Wakil Ketua	1
3	Ruang Hakim	3
4	Ruang Panitera	1
5	Ruang Sekretaris	1
6	Ruang Kepaniteraan Pidana	1
7	Ruang Kepaniteraan Perdata	1
8	Ruang Kepaniteraan Hukum	1
9	Ruang Bagian Umum dan Keuangan	1
10	Ruang Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	1
11	Ruang Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	1



12	Ruang Sidang Cakra	1
13	Ruang Sidang Candra	1
14	Ruang Sidang Sari	1
15	Ruang Mediasi	1
16	Ruang Server	1
17	Ruang Tamu Terbuka	2
18	Ruang Tahanan	2
19	Ruang Tunggu Anak	1
20	Ruang Klinik	1
21	Ruang Menyusui (Laktasi)	1
22	Ruang Tunggu Jaksa, Peksus, dan Bapas	1
23	Ruang Posbakum	1
24	Ruang Tunggu Pengacara	1
25	Ruang Tunggu Pengamanan Sidang	1
26	Ruang Kaukus	1
27	Ruang Arsip Kepaniteraan	1
28	Ruang Pustaka	1
29	Ruang Tunggu Hakim	1
30	Ruang Command Centre	1
31	Toilet	11
32	Mushalla	1
33	Kantin	0
34	Ruang Tunggu Pengunjung Sidang	1
35	Toilet difabel	2
Sarana Prasarana Fasilitas Perkantoran		
1	Mesin Fotocopy Folio	1
2	Transportable Generating Set	1
3	Lemari Besi/ Metal	21
4	Lemari Kayu	23
5	Filling Cabinet Besi	12
6	Brandkas	2
7	Roll Opek	3
8	CCTV	2 DVR, 24 titik



9	CCTV	1
10	Papan Visual/Papan Nama	1
11	CCTV	21
12	Papan Visual/Papan Nama	23
13	Mesin Absensi	12
14	Hand Metal Detector	2
	Lcd Projector/ Infocus	3
15	Papan Pengumuman	1
16	Meja Kerja Kayu	1
17	Kursi Besi/ Metal	21
18	Kursi Kayu	23
19	Sice	12
20	Bangku Panjang Kayu	2
21	Meja Komputer	3
22	Meja Resepsionis	1
23	Kasur/Spring Bed	1
24	Publik Astari (pembatas antrian)	21
25	Lemari Es	23
26	Lemari Es	12
27	A.C. Split	2
28	Kipas Angin	3
29	Televisi	2
30	Loud Speaker	1
31	Sound System	1
32	Stabilisator	1
33	Lambang Instansi	1
34	Gordyin/kray	2
35	Bracket Standing Peralatan	6
36	Tangki Air	1
37	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1
38	Camera Digital	1
39	Mesin Potong	2
40	Telephone PABX	1
41	Finger Printer Time abd Attendance Acces Control System	1
42	Internet	21



43	Komputer Jaringan Lainnya	18
44	P.C Unit	1
45	Lap Top	14
46	Scanner Peralatan Mini Komputer	5
47	Printer Peralatan Personal Komputer	3
48	Scanner Peralatan Personal Komputer	1
49	Server	1
50	Router	1
51	Rak Server	1
7	PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING	
	Sarana/Prasarana Gedung	
1	Ruang Sidang Umum	2
2	Ruang Sidang Anak	1
3	Ruang Tahanan Dewasa	2
4	Bapas/Peksos/Advokat	1
5	Laktasi/Klinik	1
6	Ramah Anak Dan Korban	1
7	Ramah Anak Pelaku	1
8	Jaksa	1
9	Tamu Terbuka	1
10	Kaukus/Mediasi/Diversi	1
11	Teleconference/Media Centre	1
12	Posbankum	1
13	Meja Inzage	1
14	MEJA E-Court	1
	Sarana Prasarana Fasilitas Perkantoran	
1	Komputer	48
2	Ac	19
3	Mesin Fotocopy	1
4	Genset	2
5	Kendaraan Dinas Roda 2	6
6	Kendaraan Dinas Roda 4	2
7	Kursi Roda	1
8	Tongkat	1



9	Laptop	24
10	Brankas	3
8	PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG	
	Sarana/Prasarana Gedung	
1	Ruang Ketua	1
2	Ruang Wakil Ketua	1
3	Ruang Hakim	1
4	Ruang Panitera	1
5	Ruang Sekretaris	1
6	Ruang Kepaniteraan Perdata	1
7	Ruang Kepaniteraan Hukum	1
8	Ruang Kepaniteraan Pidana	1
9	Ruang Umum dan Keuangan	1
10	Ruang PTIP	1
11	Ruang Kepegawaian, Ortala	1
12	Ruang Dharmayukti Karini	1
13	Ruang Persediaan	1
14	Ruang Ajudan	1
15	Ruang Sidang	3
16	Ruang Tahanan	2
17	Ruang Mediasi	1
18	Ruang Lobby	1
19	Ruang Jaksa	1
20	Ruang Posbakum	1
21	Ruang Polisi	1
22	Ruang Laktasi	1
23	Ruang Server	1
24	Ruang Rapat	1
25	Ruang Arsip	2
26	Ruang Perpustakaan	1
27	Ruang Barang Bukti	1
	Sarana Prasarana Fasilitas Perkantoran	
1	Mesin Pompa Air Pmk	3
2	Lemari Kayu	43



3	Rak Kayu	6
4	Brandkas	3
5	Tabung Pemadam Api	4
6	Fire Alarm	1
7	CCTV	4
8	Mesin Absensi	1
9	Lcd Projector/infocus	1
10	Meja Kerja Kayu	68
11	Kursi Besi/metal	118
12	Kursi Kayu	41
13	Sice	8
14	Bangku Panjang Kayu	11
15	Meja Rapat	7
16	Meja Telepon	1
17	Meja Resepsionis	3
18	Partisi	2
19	Mesin Penghisap Debu	1
20	Mesin Pemotong Rumput	1
21	AC Split	20
22	Televisi	4
23	Loudspeaker	4
24	Sound System	2
25	Unit Power Supply	3
26	Lambang Garuda Pancasila	2
27	Tiang Bendera	2
28	Tangga Aluminium	1
29	Palu Sidang	2
30	Lambang Instansi	1
31	Audio Mixing Console	1
32	Microphone/Wireless Mic	1
33	UPS	4
34	Camera Digital	1
35	Telephone (pabx)	1
36	Telephone Mobile	2
37	Facsimile	1



38	Internet	1
39	Komputer Jaringan Lainnya	1
40	PC Unit	40
41	Lap Top	17
42	Printer	12
43	Scanner	2
44	Server	3
45	Router	3
46	Wireless Access Point	1
47	Sumur Pemboran Air	1
48	Monografi	461
49	Software Komputer	2
50	Camera Conference	3
51	Genset	1
9	PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH	
	Sarana/Prasarana Gedung	
1	Ruang Ketua	1
2	Ruang Wakil Ketua	1
3	Ruang Hakim	2
4	Ruang Panitera	1
5	Ruang Sekretaris	1
6	Ruang Sidang Umum	3
7	Ruang Kepaniteraan	3
8	Ruang Kesekretariatan	3
9	Ruang Mediasi/Diversi/Media Center	1
10	Ruang Posbakum	1
11	Ruang Jaksa dan Bapas	1
12	Ruang Tahanan	2
13	Perpustakaan	1
14	Ruang Arsip	1
15	Gudang	2
16	Ruang tunggu anak	1
17	Klinik dan Laktasi	1
18	Toilet Hakim dan Pegawai	5
19	Toilet Umum	2



20	Toilet Tahanan	3
21	Mushalla (Tempat Ibadah)	1
22	Kantin	1
23	Smoking Area Umum dan Pegawai	2
24	PTSP	1
25	Ruang Tamu Terbuka	1
26	Ruang Tunggu Pengunjung	1
Sarana Prasarana Fasilitas Perkantoran		
1	Lemari Kayu	20
2	Rak Besi	8
3	Transportabel Generating Set	1
4	Mesin Fotocopy Folio	1
5	Filling Kabinet Kayu	3
6	Brandkas	2
7	CCTV	2 paket
8	Mesin Absensi	1
9	Hand Metal Detector	2
10	LCD Projector/Infokus	1
11	Focusing Screen / Layar LCD Proyektor	1
12	Perkakas Kantor Lainnya	5
13	Meja Kerja Kayu	53
14	Kursi Besi Metal	87
15	Kursi Kayu	16
16	Sice	6
17	Bangku Panjang Kayu	21
18	Meja Komputer	4
19	Meja Resepsionis	3
20	Jam elektronik	2
21	Lemari Es	1
22	Mesin Pemotong Rumput	1
23	A.C Split	19
24	Kipas Angin	3
25	Televisi	4
26	Amplifiere	1
27	Loudspeaker	7



28	Sound System	3
29	Microphone Table Stand	5
30	Alat hiasan	1
31	Lambang Garuda Pancasila	7
32	Gambar Presiden /Wakil Presiden	7
33	Tiang Bendera	5
34	Kaca Hias	1
35	Palu sidang	2
36	Lambang Instansi	1
37	Vertikal Blint	1
38	Audio Visual	1
39	Bracket Standing Peralatan	1
40	Audio Mixing Console	1
41	UPS	5
42	Digital LED Running Text	1
43	LCD Monitor	4
44	Kamera Conference	5
45	Telephone (PABX)	1
46	Pesawat Telephone	13
47	Facsimile	1
48	Internet	1
49	Komputer Jaringan Lainnya	1
50	PC Unit	31
51	Laptop	23
52	Printer	11
53	Scanner	6
54	Server	2
55	Router	1
56	Hub	1
57	Rak Server	1
58	Acces Point	9
59	Jaringan Transmisi Lainnya	1
60	Monografi	7117
61	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1
62	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1



63	Bangunan Tempat Persidangan Lainnya	1
64	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	2
65	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	7
10	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI	
	Sarana/Prasarana Gedung	
1	Ruang Ketua	1
2	Ruang Wakil Ketua	1
3	Ruang Hakim	1
4	Ruang Panitera	1
5	Ruang Sekretaris	1
6	Ruang Sidang	3
7	Ruang Panmud Pidana	1
8	Ruang Panmud Perdata	1
9	Ruang Panmud Hukum	1
10	Ruang Kasubag Umum dan Keuangan	1
11	Ruang Kasubag Perencnaan ,IT dan Pelaporan	1
12	Ruang Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1
13	Ruang Klinik Kesehatan	1
14	Ruang Gasrase/ Dapur	1
15	Ruang Arsip	1
16	Ruang Perpustakaan	1
17	Ruang Tunggu Anak	1
18	Ruang Ramah Anak / Laktasi	1
19	Ruang Jaksa	1
20	Ruang Penasehat Hukum	1
21	Ruang Bapas	1
22	Ruang Tahanan	1
23	Ruang Tahanan Anak	2
24	Ruang Mediasi / Diversi	1
25	Ruang Media center	1
26	Ruang Ziiting platz	2
27	Ruang Toilet	20
28	Ruang Mushola	1
29	Ruang Genset	1
30	Ruang Penyimpanan	1



	Sarana Prasarana Fasilitas Perkantoran	
1	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27Inc)	5
2	Lemari kayu	43
3	Rak kayu	4
4	Filing Cabinet besi	7
5	Brankas	2
6	Peti uang /cashbox/Coin Box	3
7	Kardek Besi	2
8	Buffet	1
9	Locker	3
10	CCTV	5
11	Papan visual/ papan nama	2
12	White board	14
13	Mesin absen	2
14	Hand Metal detector	1
15	Perkakas Kantor Lainnya	2
16	Meja kayu	97
17	Kursi besi/metal	201
18	Kursi kayu	187
19	Sice	22
20	Bangku Panjang besi/metal	12
21	Bangku panjang kayu	17
22	Meja rapat	10
23	Meja komputer	11
24	Meja telepon	1
25	Meja Ressepsionis	2
26	Partisi	3
27	Meubelair lainnya	1
28	Jam elektronik	17
29	Mesin penghisap debu	2
30	Mesin potong rumput	1
31	Lemari es	2
32	Ac Split	20
33	Kipas angin	12
34	Kompor gas	1



35	Rice cooker	1
36	Oven listrik	1
37	Televisi	10
38	Loudspeaker	5
39	Sound System	3
40	Microphone	7
41	Lambang Garuda Pancasila	3
42	Tiang bendera	13
43	Pataka	5
44	Kaca hias	9
45	Palu sidang	6
46	Lambang instansi	1
47	Vertikal Blind	1
48	Bracket Standing Peralatan	1
49	Alat Rumah Tangga lainnya	33
50	Audio Mixing Console	1
51	Uninterruptible Power Supply (UPS)	7
52	Camera Digital	1
53	LCD Monitor	1
54	Camera Conference	3
55	Telepone (PABX)	1
56	Pesawat Telephone	15
57	Receiver STL/UHF	4
58	Genset	1
59	Komputer Jaringan Lainnya	1
60	Lokal Area Network (LAN)	1
61	P.C unit	35
62	Lap top	19
63	CPU (Peralatan Personal Komputer)	2
64	Printer (Peralatan Personal Komputer)	31
65	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4
66	Peralatan Personal Komputer Lainnya	2
67	Server	2
68	Router	1
69	Rak Server	1



70	Switch	4
71	Aid Hearing	1
72	Monografi	1.913
73	Buku lainnya	6
11	PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR	
	Sarana/Prasarana Gedung	
1	Ruangan Ketua	1
2	Ruangan Wakil Ketua	1
3	Ruangan Hakim	1
4	Ruangan Panitera	1
5	Ruangan Sekretaris	1
6	Ruangan Sidang Umum	1
7	Ruang Sidang Teleconference	1
8	Ruangan Sidang Anak	1
9	Ruangan Kepaniteraan Pidana	1
10	Ruangan Kepaniteraan Perdata	1
11	Ruangan Kepaniteraan Hukum	1
12	Ruangan Kesekretariatan Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	1
13	Ruangan Kesekretariatan Umum dan Keuangan	1
14	Ruangan Kesekretariatan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1
15	Ruangan Server	1
16	Ruangan Mediasi	1
17	Ruangan Posbakum	1
18	Ruangan Ibu Menyusui dan Kesehatan	2
19	Ruangan Tunggu Anak	1
20	Ruangan Tahanan Pria	1
21	Ruangan Tahanan Wanita	1
22	Ruangan Jaksa	1
23	Ruangan Pengacara	1
24	Ruangan Tunggu Terbuka	1
25	Ruangan Kasir	1
26	Ruangan Panitera Pengganti	1
27	Ruangan Jurusita Pengganti	1



28	Ruangan Arsip	1
29	Ruangan Rapat	1
30	Pantri	1
31	WC	19
32	Pustaka	1
33	Ruangan Bermain Anak	1
34	Smoking Area	2
35	Gudang	3
Sarana Prasarana Fasilitas Perkantoran		
1	Komputer	39
2	Laptop	40
3	Infokus	2
4	PABX/Pesawat Telephone	18
5	Mesin Ketik	11
6	Mesin Fotocopy	2
7	AC	56
8	Faximili	3
9	Genset	2
10	Printer	51
11	Lemari	51
12	Kursi	241
13	Meja komputer	14
14	Brangkas	3
15	Rak	6
16	Filing Cabinet	9
17	Kiosk	1
12	PENGADILAN NEGERI PAINAN	
Sarana/Prasarana Gedung		
1	Ruang Ketua	1
2	Ruang Wakil Ketua	1
3	Ruang Hakim	1
4	Ruang Panitera	1
5	Ruang Sekretaris	1
6	Ruang Sidang I	1
7	Ruang Sidang II	1



8	Ruang Sidang Anak	1
9	Ruang Kepaniteraan Pidana	1
10	Ruang Kepaniteraan Perdata	1
11	Ruang Kepaniteraan Hukum	1
12	Ruang Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	1
13	Ruang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1
14	Ruang Umum dan Keuangan	1
15	Ruang Laktasi	1
16	Ruang Arsip Hukum	1
17	Ruang Tunggu Anak	1
18	Ruang Konseling Anak	-
20	Ruang Mediasi/ Diversi	1
21	Ruang Tamu Terbuka	1
22	Ruang Jaksa	1
23	Ruang Server	1
24	Ruang Posbakum	1
25	Ruang Perpustakaan	1
26	Ruang Tunggu Pengunjung	1
27	Ruang Tahanan Pria	1
28	Ruang Tahanan Wanita	1
29	Ruang Mushalla	1
30	Toilet Ketua	1
31	Toilet Wakil Ketua	1
32	Toilet Disabilitas	1
33	Toilet Panitera	-
34	Toilet Pegawai	1
35	Toilet Pengunjung	3
36	Toilet Ruang Sidang Anak	4
37	Ruang Bapas	1
38	Ruang Peksos	1
39	Ruang Pelaku Anak	1
40	Ruang Poliklinik	1
Sarana Prasarana Fasilitas Perkantoran		
1	Kendaraan Roda 4	4
2	Sepeda Motor	6



3	Mesin Fotocopy Lainnya	1
4	Lemari Besi/Metal	26
5	Lemari Kayu	34
6	Rak Besi	25
7	Rak Kayu	1
8	Filing Cabinet Besi	14
9	Brandkas	4
10	Mobile File	2
11	Lemari Display	1
12	Tabung Pemadam Api	5
13	CCTV - Camera Control Television System	4
14	Papan Visual/Papan Nama	2
15	Alat Penghancur Kertas	1
16	Mesin Absensi	1
17	Hand Metal Detector	1
18	Perkakas Kantor Lainnya	9
19	Meja Kerja Kayu	80
20	Kursi Besi/Metal	159
21	Kursi Kayu	24
22	Sice	2
23	Bangku Panjang Besi/Metal	10
24	Bangku Panjang Kayu	29
25	Meja Rapat	3
26	Meja Ketik	3
27	Meja Telepon	1
28	Meja Resepsionis	1
29	Meubelair Lainnya	3
30	Jam Elektronik	18
31	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2
32	Lemari Es	3
33	A.C. Window	4
34	A.C. Split	30
35	Kipas Angin	11
36	Televisi	2
37	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	2



38	Loudspeaker	4
39	Sound System	1
40	Microphone	7
41	Mic Conference	2
42	Kaca Hias	7
43	Dispenser	13
44	Palu Sidang	3
45	Lambang Instansi	1
46	Bracket Standing Peralatan	1
47	Audio Mixing Console	1
48	Uninterruptible Power Supply (UPS)	16
49	Camera Digital	1
50	LCD Monitor	1
51	Camera Conference	1
52	Telephone (PABX)	1
53	Facsimile	2
54	Local Area Network (LAN)	1
55	Komputer Jaringan Lainnya	1
56	P.C Unit	45
57	Lap Top	23
58	Printer (Peralatan Personal Komputer)	21
59	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	8
60	Peralatan Personal Komputer Lainnya	1
61	Server	2
62	Router	1
63	Rak Server	1
13	PENGADILAN NEGERI KOTABARU	
	Sarana/Prasarana Gedung	
1	Ruang Ketua	1
2	Ruang Wakil Ketua	1
3	Ruang Hakim	2
4	Ruang Panitera	1
5	Ruang Sekretaris	1
6	Ruang Sidang I	1



7	Ruang Sidang II	1
8	Ruang Sidang Anak	1
9	Ruang Kepaniteraan Pidana	1
10	Ruang Kepaniteraan Perdata	1
11	Ruang Kepaniteraan Hukum	1
12	Ruang Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	1
13	Ruang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1
14	Ruang Umum dan Keuangan	1
15	Ruang Kesehatan dan Laktasi	1
16	Ruang Arsip Hukum	1
17	Ruang Tunggu Anak	1
18	Ruang Konseling Anak	1
20	Ruang Mediasi/ Diversi	1
21	Ruang Tamu Terbuka	1
22	Ruang Jaksa	1
23	Ruang Server	1
24	Ruang Posbakum	1
25	Ruang Perpustakaan	1
26	Ruang Tunggu Pengunjung	1
27	Ruang Tahanan Pria	1
28	Ruang Tahanan Wanita	1
29	Ruang Mushalla	1
30	Toilet Ketua	1
31	Toilet Wakil Ketua	1
32	Toilet Disabilitas	1
33	Toilet Sekretaris	1
34	Toilet Pegawai	2
35	Toilet Pengunjung	1
36	Toilet Tunggu Anak	1
37	Toilet Konseling Anak	1
	Sarana Prasarana Fasilitas Perkantoran	
1	Station Wagon	2
2	Sepeda Motor	6
3	Lemari Besi Metal	1



4	Lemari Kayu	32
5	Rak Besi	10
6	Filling Cabinet Besi	13
7	Brangkas	2
8	CCTV-Camera Control Television System	2
9	Papan Visual / Papan Nama	6
10	White Board	6
11	Peta	1
12	Mesin Absensi	1
13	Meja Kerja Besi/Metal	22
14	Meja Kerja Kayu	44
15	Kursi Besi/Metal	71
16	Kursi Kayu	66
17	Sice	4
18	Bangku Panjang Kayu	27
19	Meja Rapat	20
20	Meja Komputer	8
21	Meja Resepsionis	2
22	Kursi Fiber Glas/Plastik	19
23	Mesin Potong Rumput	1
24	Lemari Es	1
25	A.C Split	25
26	Kipas Angin	6
27	Televisi	6
28	Sound System	1
29	Loud Speaker	4
30	Microphone	7
31	Lambang Garuda Pancasila	2
32	Gambar Presiden/Wakil Presiden	2
33	Tiang Bendera	8
34	Kaca Hias	1
35	Palu Sidang	2
36	Lambang Instansi	1
37	Uninterruptible Power Suply (UPS)	8
38	Bracket Standing	1



38	Audio Mixing Console	1
39	Video Conference	1
40	LCD Monitor	2
41	Camera Conference	1
42	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	1
43	Facsimile	1
44	Local Battery Telephone	1
45	Genset	1
46	Local Area Network (LAN)	4
47	Komputer Jaringan Lainnya	1
48	P.C Unit	31
49	LapTop	21
50	Printer (Peralatan Personal Komputer)	24
51	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	7
52	Peralatan Personal Komputer Lainnya	1
53	Server	3
54	Router	2
14	PENGADILAN NEGERI SOLOK	
	Sarana/Prasarana Gedung	
1	Ruang Ketua	1
2	Ruang Wakil Ketua	1
3	Ruang Hakim	1
4	Ruang Panitera	1
5	Ruang Sekretaris	1
6	Ruang Sidang	2
7	Ruang Sidang Anak	1
8	Ruang Mediasi/Diversi	1
9	Ruang Kepaniteraan Pidana	1
10	Ruang Kepaniteraan Perdata	1
11	Ruang Kepaniteraan Hukum	1
12	Ruang Subbag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	1
13	Ruang Subbag. Umum dan Keuangan	1
14	Ruang Subbag. Perencanaan, TI dan Pelaporan	1
15	Ruang Server	1



16	Ruang Posbakum	1
17	Ruang Perpustakaan	1
18	Ruang Arsip	1
19	Ruang Jaksa/BAPAS	1
20	Ruang Tahanan	2
21	Ruang Barang Bukti	1
22	Ruang Laktasi	1
23	Ruang Tunggu Ramah Anak	1
24	Ruang Kasir	1
25	Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	1
26	Ruang Tunggu	1
27	Ruang Tamu Terbuka	1
28	Ruang Tunggu Anak Saksi/Korban	1
29	Ruang Kaukus	1
30	Ruang Dharmayukti Karini	1
31	Musholla	1
32	Pojok e-Court	1
33	Meja Informasi	1
34	Toilet	8
35	Toilet Difabel	1
Sarana Prasarana Fasilitas Perkantoran		
1	Mesin Pompa Air PMK	1
2	Mesin Fotocopy Folio	2
3	Lemari Kayu	9
4	Rak Besi	5
5	Brandkas	2
6	CCTV	19
7	Hand Metal Detector	1
8	Mesin Absensi	1
9	LCD Projector/Infocus	1
10	Meja Kerja Kayu	50
11	Kursi Besi/Metal	101
12	Kursi Kayu	17
13	Sice	1
14	Meja Rapat	2



15	Meja Komputer	4
16	Meja Resepsionis	1
17	Publik Astari (Pembatas Antrian)	1
18	Mesin Pemotong Rumput	2
19	Lemari Es	3
20	A.C Split	15
21	Treng Air/Tandon Air	1
22	Televisi	9
23	Loudspeaker	4
24	Sound System	3
25	Wireless	1
26	Microphone	7
27	Lambang Garuda Pancasila	1
28	Tiang Bendera	6
29	Palu Sidang	1
30	Lambang Instansi	1
31	Vertikal Blind	3
32	Bingkai Foto	2
33	Bracket Standing Peralatan	1
34	Audio Mixing Console	1
35	Uninterruptible Power Supply (UPS)	7
36	Camera Digital	2
37	Video Conference	1
38	LCD Monitor	2
39	Camera Conference	1
40	Telephone (PABX)	1
41	Facsimile	2
42	Telepon Analog	8
43	Genset	1
44	Komputer Jaringan Lainnya	1
45	P.C Unit	35
46	Lap Top	30
47	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12
48	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3
49	Server	4



50	Router	1
51	Rak Server	2
52	Peralatan Jaringan Lainnya	1
53	Monografi	61
54	Kursi Roda	1
55	Tongkat Kruk	1
56	Alat Bantu Dengar	1
15	PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO	
	Sarana/Prasarana Gedung	
1	Ruang Ketua	1
2	Ruang Wakil Ketua	1
3	Ruang Hakim	1
4	Ruang Panitera	1
5	Ruang Tunggu Sidang Anak	1
6	Ruang Sekretaris	1
7	Ruang Sidang Umum	3
8	Ruang Kepaniteraan	3
9	Ruang Kesekretariatan	3
10	Ruang Rapat	1
11	Ruang Mediasi	1
12	Ruang Laktasi	1
13	Ruang Posyankum	1
14	Ruang Jaksa	1
15	Ruang Ramah Anak	1
16	Ruang Barang Bukti	1
17	Ruang Serbaguna	1
18	Ruang Tahanan	2
19	Mushalla dan Ruang Ginset	1
20	Dapur Bersih	1
21	Toilet Umum	4
22	Gudang	1
	Sarana Prasarana Fasilitas Perkantoran	
1	Mesin Ketik Manual Standar (14-16 Inc)	24



2	Mesin Hitung Manual	2
3	Mesin Hitung Elektrik/kalkulator	1
4	Mesin Stensil Manual folio	1
5	Mesin Fotocopy electronic	1
6	Lemari Besi	3
7	Lemari Kayu	81
8	Rak Besi	4
9	Filing Cabinet Besi	11
10	Brankas	4
11	Tabung Pemadam Api	16
12	Camera Control Television System	1
13	Alat Penghancur Kertas	1
14	Mesin Absensi	1
15	Papan Nama	12
16	Hand Metal Detektor	1
17	Lcd Projector	1
18	Focusing Screen	1
19	Papan Gambar	24
20	Perkakas kantor lainnya	8
21	Meja kerja kayu	87
22	Kursi Metal	136
23	Kursi kayu	22
24	Sice	18
25	Bangku Panjang kayu	42
26	Meja Rapat	1
27	Meja Komputer	5
28	Meja Ketik	1
29	Meja Resepcionista	2
30	Kursi Fiberglass	53
31	Partisi	1
32	Publik Astari	2
33	Jam Listrik	1
34	Jam elektronik	16
35	Mesin Penghisap Debu	2
36	Mesin Pemotong rumput	1



37	AC Split	32
38	Portable Air Conditioner	1
39	Kipas Angin	15
40	Alat Pendingin Lainnya	4
41	Tape Recorder	3
42	Loudspeaker	4
43	Sound system	4
44	Microphone	2
45	Microphone Table stand	7
46	Tustel	2
47	Lambang Garuda Pancasila	5
48	Gambar Presiden/wakil	3
49	Tangga Aluminium	1
50	Kaca Hias	1
51	Palu Sidang	2
52	Lambang Instansi	1
53	Karpet	2
54	Gordyn	2
55	Audio Mixing Console	2
56	Audio Mixing Portable	1
57	Intercom Unit	8
58	Wireless Mic	3
59	Boom Stand	1
60	UPS	13
61	Lcd Monitor	3
62	PABX	1
63	Pesawat Telepon	2
64	Faximile	1
65	Genset	2
66	Internet	1
67	PC Unit	30
68	Laptop	16
69	Note Book	2
70	Printer	22
71	Scaner	2



72	Viewer	1
73	Server	3
74	Router	2
75	Rak Server	1
76	Switch	1
77	Peralatan Jaringan Lainnya	1
78	Monitor	2
79	Printer (peralatan personal computer)	42
80	Peralatan rumah tangga lainnya	39
81	Server	2
82	Router	1
83	Switch	4
16	PENGADILAN NEGERI MUARO	
	Sarana/Prasarana Gedung	
1	Ruang Ketua	1
2	Ruang Wakil Ketua	1
3	Ruang Hakim	1
4	Ruang Panitera	1
5	Ruang Sekretaris	1
6	Ruang Sidang Umum	2
7	Ruang Sidang Anak	1
8	Ruang Kepaniteraan Pidana	1
9	Ruang Kepaniteraan Perdata	1
10	Ruang Kepaniteraan Hukum	1
11	Ruang Bagian Umum dan Keuangan	1
12	Ruang Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tatalaksana	1
13	Ruang Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	1
14	Ruang Perpustakaan	1
15	Ruang Server	1
16	Ruang Tahanan	2
17	Ruang Laktasi	1
18	Ruang Arsip Perkara	2
19	Ruang Posbakum	1
20	Ruang Jaksa	1



21	Ruang Mediasi	1
22	Ruang Media Center	1
23	Toilet Difabel	1
24	Toilet	4
25	Ruang Layanan PTSP	1
	Sarana dan Prasarana Fasilitas Perkantoran	
1	Server	2
2	Personal Computer (PC)	38
3	Laptop/Notebook	21
4	Printer	14
5	Genset	2
6	Lemari (Besi/Kayu)	23
7	Kursi (Besi/Kayu/Fiber/Plastik/Bangku Panjang)	142
8	Si Ce	9 Set
9	Meja (Kerja/Rapat/Komputer/Besi/Kayu)	50
10	Brankas	3
11	Rak (Besi/Kayu)	2
12	Filing Cabinet	7
13	Rak Server	2
14	Kios-K	1
15	Loudspeaker	4
16	Sound System	2
17	A.C. Split	27
18	CCTV	4
19	LCD Projector/Infocus	1
20	Mesin Absensi	2
21	Kipas Angin	6
22	Microphone	7
23	Uninterruptible Power Supply (UPS)	7
24	LCD Monitor	1
25	Camera Conference	1
26	Scanner Faximile	1
27	Kursi Zeis	2
28	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1



17	PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG	
	Sarana Prasarana Gedung	
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2
2	Ruang Ketua	1
3	Ruang Wakil Ketua	1
4	Ruang Hakim	4
5	Ruang Panitera	1
6	Ruang Sekretaris	1
7	Ruang Sidang Umum	1
8	Ruang Sidang Pidana	1
9	Ruang Sidang Perdata	1
10	Ruang Sidang Anak	1
11	Ruang Panitera Pengganti	2
12	Ruang Jurusita	1
13	Ruang Kesekretariatan (ZI/RB/APM)	1
14	Ruang Kortala	1
15	Ruang Umum dan Keuangan	1
16	Ruang PTIP	1
17	Ruang Pidana	1
18	Ruang Perdata	1
19	Ruang Hukum	1
20	Ruang Rapat	1
21	Ruang Media Center	1
22	Ruang Dharmayukti	1
23	Ruang Server	1
24	Ruang Tunggu + Selasar	1
25	Ruang PTSP	1
26	Ruang Arsip	2
27	Ruang Tahanan	1
28	Lobby Utama	1
29	Gudang	1
30	Ruang Posbakum	1
31	Ruang PPID	1
32	Ruang Jaksa	1
33	Ruang Barang Bukti	1



34	Ruang Kesehatan	1
35	Ruang Mediasi & Kaukus	1
36	Ruang Tunggu Anak Laki-Laki	1
37	Ruang Tunggu Anak Perempuan	1
38	Ruang Tunggu Sidang	1
39	Ruang Pengacara	1
40	Ruang Jaksa	1
41	Ruang Diversi	1
42	Ruang Bapas	1
43	Ruang Teleconference	1
44	Ruang Saksi Korban	1
45	Ruang Perpustakaan	1
46	Ruang Laktasi dan Bermain Anak	1
Sarana Prasarana Fasilitas Perkantoran		
1	Loudspeaker	4
2	Server	2
3	Mesin Absensi	1
4	CCTV - Camera Control Television System	1
5	Uninterruptible Power Supply (UPS)	5
6	Printer	4
7	Scanner	2
8	LCD Monitor	1
9	Lap Top	16
10	P.C Unit	19
11	Audio Mixing Console	1
12	Camera Conference	1
13	Wireless Access Point	2
14	Router	2

1. TANAH

Dalam upaya terus mewujudkan tertib administrasi, tertib fisik dan tertib pengelolaan dan penatausahaan BMN. Pengadilan Tinggi Maupun Pengadilan Negeri terus melakukan inventarisasi legalitas Kepemilikan seluruh BMN. Khususnya sertifikat tanah. Hal ini disebabkan kompleksitas masalah tanah yang menurut ketentuan peraturan perundang – rundangan harus berstatus milik pemerintah Republik Indonesia. Berikut rincian progres pelaksanaan sertifikasi tanah selama tahun 2024 pada Pengadilan sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang.

Tabel 28. Kondisi Sertifikasi Tanah
pada Satuan Kerja Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang

NO	SATKER	SUDAH BERSERTIFIKAT	BELUM BERSERTIFIKAT	TOTAL
1	Pengadilan Tinggi Padang	6	2	8
2	Pengadilan Negeri Padang	1	0	1
3	Pengadilan Negeri Pariaman	6	1	7
4	Pengadilan Negeri Bukittinggi	9	0	9
5	Pengadilan Negeri Sawahlunto	8	1	9
6	Pengadilan Negeri Payakumbuh	1	0	1
7	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	6	0	6
8	Pengadilan Negeri Batusangkar	2	0	2
9	Pengadilan Negeri Solok	6	0	6
10	Pengadilan Negeri Painan	9	0	9
11	Pengadilan Negeri Padang Panjang	1	0	1
12	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	5	0	5
13	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	6	0	6



14	Pengadilan Negeri Koto Baru	2	0	2
15	Pengadilan Negeri Muaro	6	0	6
16	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	2	0	2
17	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	2	0	2



2. RUMAH DINAS

Tabel 29. Kondisi Rumah Dinas Satuan Kerja

No	PENGADILAN	KETUA	WAKIL KETUA	HAKIM	PANITERA	SEKRETARIS	KONDISI			JUMLAH
							BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1	Pengadilan Tinggi Padang	1	1	4	-	1	3	4	3	10
2	Pengadilan Negeri Padang	1	1	7	1	-	11	-	1	12
3	Pengadilan Negeri Pariaman	1	-	6	1	1	9	-	-	9
4	Pengadilan Negeri Bukittinggi	1	1	7	1	1	1	15	1	17
5	Pengadilan Negeri Sawahlunto	1	1	9	1	1	13	-	-	13
6	Pengadilan Negeri Payakumbuh	1	1	6	1	-	7	2	-	9
7	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	1	0	8	1	1	11	-	-	11



8	Pengadilan Negeri Batusangkar	1	1	5	1	-	8	-	-	8
9	Pengadilan Negeri Solok	1	1	6	1	1	10	-	-	10
10	Pengadilan Negeri Painan	1	1	7	1	1	9	-	2	11
11	Pengadilan Negeri Padang Panjang	1	1	7	1	1	8	2	1	11
12	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	1	1	4	1	-	7	-	-	7
13	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	1	1	4	1	-	7	-	-	7
14	Pengadilan Negeri Koto Baru	1	1	4	1	1	8	-	-	8
15	Pengadilan Negeri Muaro	1	1	3	1	1	7	-	-	7
16	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	1	1	1	1	-	4	-	-	4
17	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		16	14	88	15	10	123	23	8	154



3. KENDARAAN DINAS

Tabel 30. Kondisi Kendaraan Dinas

NO	SATKER	URAIAN	KONDISI			JUMLAH SUDAH PSP	JUMLAH BELUM PSP
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT		
1	Pengadilan Tinggi Padang	Kendaraan Roda 2	6	1	-	7	-
		Kendaraan Roda 4	5	-	-	5	-
2	Pengadilan Negeri Padang	Kendaraan Roda 2	-	11	1	12	-
		Kendaraan Roda 4	2	2	-	4	-
3	Pengadilan Negeri Pariaman	Kendaraan Roda 2	4	6	1	11	-
		Kendaraan Roda 4	5	1	1	7	-



4	Pengadilan Negeri Bukittinggi	Kendaraan Roda 2	3	5	-	8	-
		Kendaraan Roda 4	1	2	1	4	-
5	Pengadilan Negeri Sawahlunto	Kendaraan Roda 2	7	-	-	7	-
		Kendaraan Roda 4	4	-	-	3	1
6	Pengadilan Negeri Payakumbuh	Kendaraan Roda 2	-	5	-	5	-
		Kendaraan Roda 4	1	1	-	2	-
7	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	Kendaraan Roda 2	6	-	-	6	-
		Kendaraan Roda 4	2	-	-	2	-
8	Pengadilan Negeri Batusangkar	Kendaraan Roda 2	-	-	7	7	-
		Kendaraan Roda 4	2	-	2	2	2
9	Pengadilan Negeri Solok	Kendaraan Roda 2	5	-	-	3	2
		Kendaraan Roda 4	5	-	-	5	-
10	Pengadilan Negeri Painan	Kendaraan Roda 2	3	-	-	3	-
		Kendaraan Roda 4	6	-	-	6	-
11		Kendaraan Roda 2	-	7	-	7	-



	Pengadilan Negeri Padang Panjang	Kendaraan Roda 4	2	1	-	3	-
12	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	Kendaraan Roda 2	6	2	-	8	-
		Kendaraan Roda 4	-	2	-	2	-
13	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	Kendaraan Roda 2	7	-	2		
		Kendaraan Roda 4	3	-	-		
14	Pengadilan Negeri Koto Baru	Kendaraan Roda 2	6	-	-	6	-
		Kendaraan Roda 4	2	-	-	2	-
15	Pengadilan Negeri Muaro	Kendaraan Roda 2	10	-	-	10	-
		Kendaraan Roda 4	4	-	-	4	-
16	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	Kendaraan Roda 2	-	4	-	2	2
		Kendaraan Roda 4	3	1	-	2	2
17	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	Kendaraan Roda 2	2	-	-	2	-
		Kendaraan Roda 4	1	1	-	2	-



C. Teknologi Informasi

Teknologi informasi sekarang ini berkembang dengan pesat. Pemanfaatan teknologi informasi sudah mencapai berbagai bidang kehidupan masyarakat. Teknologi informasi memudahkan para penggunanya dalam mencatat suatu transaksi, menyimpannya dalam bentuk data, mentransformasikannya menjadi informasi dan menyebarkannya kepada para pemakai informasi. Teknologi informasi memiliki banyak peranan dalam membantu dan memecahkan masalah, diantaranya membantu dalam meningkatkan produktivitas, efektivitas, efisiensi, mutu, kreativitas, dan problem solving (pemecahan masalah). Dengan dukungan teknologi informasi, kita dapat melakukan pemecahan masalah dengan cepat dan efektif, termasuk di dunia peradilan seperti Pengadilan Tinggi Padang dan Pengadilan Negeri se-Sumatera Barat.

a. Implementasi E-Court

Ecourt merupakan sebuah Sistem Informasi Pengadilan yaitu seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara dan persidangan secara elektronik. Aplikasi e-court merupakan perwujudan dari implementasi peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 yaitu Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Aplikasi ecourt merupakan sebuah sistem terpusat, artinya aplikasi tersebut berada dalam server Mahkamah Agung RI yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sehingga tidak perlu di instal di masing-masing server maupun website Pengadilan. Persidangan secara elektronik atau e-court merupakan serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkaea oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

E-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara online, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online, Pemanggilan secara online dan Persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban). Aplikasi e-Court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam



fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Pengaturan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara. Penggunaan sistem administrasi perkara secara elektronik pada tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali dapat dilaksanakan atas persetujuan para pihak dengan ketentuan administrasi perkara tersebut sudah dilaksanakan secara elektronik di tingkat pertama. Aplikasi e-court secara garis besar terbagi atas 4 ruang lingkup yaitu, e-filing (pengisian data pendaftaran perkara), e-payment (pembayaran panjar perkara), e-summons, (pemanggilan para pihak melalui alamat domisili elektronik), e-litigasi (persidangan secara online). E-Court baru terlaksana pada Pengadilan Tingkat Pertama, sementara untuk Pengadilan Tingkat Banding belum ada. Secara keseluruhan Pengadilan Negeri se-Sumatera Barat telah menerapkan Aplikasi e-Court ini dalam hal pendaftaran, dan persidangan secara online. Selama tahun 2024 Pengadilan Negeri yang memasukkan pendaftaran melalui e-court dapat dilihat pada tabel berikut:



**TABEL 31. DAFTAR PERKARA E-COURT
PENGADILAN NEGERI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN TINGGI PADANG**

No	Satuan Kerja	Pendaftaran (Dibayar)	Berhasil Nomor Perkara	Perkara Gugatan	Perkara Gugatan Sederhana	Perkara Bantahan	Permohonan	Total E- Litigasi	Ket
1	Pengadilan Negeri Padang	761	759	209	36	13	470	60	
2	Pengadilan Negeri Pariaman	217	217	86	18	5	108	217	
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	197	167	65	7	0	95	167	
4	Pengadilan Negeri Sawahlunto	17	17	3	1	0	13	17	
5	Pengadilan Negeri Payakumbuh			36	15	3	70		
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping								
7	Pengadilan Negeri Batusangkar	96	96	26	39	4	27	96	
8	Pengadilan Negeri Solok	105	100	17	16	1	66	100	-3 Gugatan yang berhasil dibayar



									namun tidak diregister karena tidak wilayah yurisdiksi PN Solok (2 perkara dibayar 2023 diregister 2024) -4 Gugatan Sederhana berhasil dibayar namun tidak diregister karena tidak
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



									wilayah yurisdiksi PN Solok
9	Pengadilan Negeri Painan	Sudah dibayar	66	27	9	0	30	66	
10	Pengadilan Negeri Padang Panjang	24	24	8	8	1	24	41	
11	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	77	77	44	10	1	22	67	*1 perkara Gugatan gugur *9 perkara gugatan dicabut
12	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	63	63	17	7	1	38	63	
13	Pengadilan Negeri Koto Baru	74	74	20	18	1	35	74	
14	Pengadilan Negeri Muaro	53	53	16	32	0	5	50	Terdapat 3 perkara



									yang baru berjalan (sidang pertama)
15	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	147	147	45	4	1	97	147	
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	53	53	18	2	-	33	53	



b. Implementasi SIPP

Melalui dukungan teknologi informasi, Pengadilan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara mengenai status perkara yang masuk, putus dan perkara yang diajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Sampai saat ini Pengadilan Tinggi Padang menerapkan SIPP versi 4.1.1 dan satuan kerja dibawahnya yakni Pengadilan Negeri se-Sumatera Barat. Data sudah termutakhirkan berdasarkan kondisi data perkara yang sebenarnya. Jaringan yang digunakan di Pengadilan Tinggi Padang adalah Internet cinox kapasitas 100 mbps yang di-sharing untuk 3 lantai menggunakan WiFi.

Pada tahun 2024, pengembangan infrastruktur teknologi informasi di Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang diarahkan untuk penggunaan aplikasi perkara Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang sudah diupdate ke versi 4.1.1. Ketersedian perangkat keras untuk pengembangan SIPP pada Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang. Berikut evaluasi terhadap implementasi SIPP pada Pengadilan Negeri di wilayah Sumatera Barat:

Tabel 32. Implementasi SIPP

Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan Tk Pertama

<http://evaluasi.badilum.mahkamahagung.go.id>

#	JUMLAH PERKARA	KELAS	PENGADILAN	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	IMPLEMENTASI SIPP
1	~500	II	Pengadilan Negeri Padang Panjang	95.41%	98.97%	96.65%	98.28%	97.33%(975.09)
1	~500	II	Pengadilan Negeri Sawahlunto	96.30%	98.45%	93.93%	99.69%	97.09%(973.28)
1	~500	II	Pengadilan Negeri Solok	95.20%	98.46%	95.03%	99.18%	96.97%(976.02)
1	~500	II	Pengadilan Negeri Payakumbuh	96.07%	97.14%	95.50%	98.93%	96.91%(970.87)
1	~500	II	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	96.30%	98.96%	93.22%	98.10%	96.65%(974.77)
6	1~500	II	Pengadilan Negeri Muaro	96.30%	96.34%	94.54%	95.69%	95.72%(954.49)
7	1~500	II	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	94.62%	97.08%	91.20%	99.19%	95.52%(944.98)
8	1~500	II	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	96.13%	97.67%	91.10%	97.03%	95.48%(959.10)
9	1~500	II	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	94.90%	96.52%	93.44%	96.12%	95.24%(952.95)
10	1~500	II	Pengadilan Negeri Batusangkar	95.05%	96.89%	92.87%	93.61%	94.60%(952.95)
11	1~500	II	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	95.64%	95.57%	95.06%	91.27%	94.38%(944.94)
12	1~500	II	Pengadilan Negeri Painan	93.70%	97.06%	92.10%	94.34%	94.30%(951.58)
13	1~500	II	Pengadilan Negeri Kotobaru	92.93%	94.55%	92.98%	96.71%	94.29%(946.17)
14	1~500	IB	Pengadilan Negeri Bukittinggi	90.83%	92.44%	88.77%	99.31%	92.84%(932.21)
15	1~500	IB	Pengadilan Negeri Pariaman	90.29%	91.94%	92.27%	89.71%	91.05%(907.82)
16	1001~2000	IA	Pengadilan Negeri Padang	91.10%	76.87%	76.81%	82.86%	81.91%(801.16)



BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

- A. Akreditasi Penjaminan Mutu**
- B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)**
- C. Inovasi Pelayanan Publik**

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Akreditasi Penjaminan Mutu

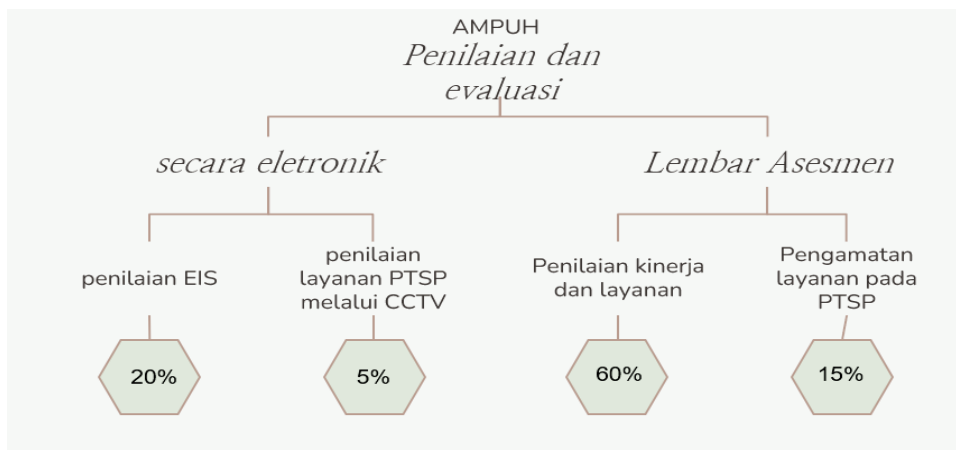
A.1. AMPUH

Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) merupakan program lanjutan dari Akreditasi Penjaminan Mutu yang sudah berjalan sejak tahun 2014. AMPUH merupakan salah satu bentuk pembinaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang memiliki tujuan untuk mendorong peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administrasi perkara, dan manajemen pelayanan di Lingkungan Peradilan Umum. Ruang lingkup program AMPUH meliputi seluruh penerapan tugas fungsi, kinerja dan pelaksanaan layanan di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Pedoman AMPUH dibuat oleh Dirjen Badillum dan program ini Diberlakukan dengan dasar hukum Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024 tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh sebagai kelanjutan Akreditasi Penjaminan Mutu. Terdapat beberapa unsur dalam aplikasi AMPUH yaitu :

- a. Sistem penilaian/evaluasi
- b. Penilaian dan predikat
- c. Struktur
- d. Pedoman pelaksanaan
- e. Sasaran dan kebijakan Mutu
- f. Pengelolaan dokumen

Berikut tahap yang digunakan dalam tata cara evaluasi dan sistem penilaian pada program AMPUH :

Gambar 3. Diagram Metode Penilaian dan Evaluasi AMPUH



Berdasarkan diagram diatas,penilaian CCTV dinilai oleh Asesor dan hasil penilaian dapat di download langsung pada apliaksi AMPUH. Nilai dan predikat diperoleh oleh Satuan Kerja dalam PROGRAM ampuh adalah sebagai berikut :

Tabel 33. Kategori Predikat pada Program AMPUH

Predikat PARIPURNA			
diraih setelah 3 tahun berturut-turut mendapat predikat Unggul			
Predikat	Nilai maksimal		
	PT	PN 1A KHUSUS DAN 1A	PN IB dan II
UNGGUL	1000	900	850
UTAMA	849	824	799
BAIK	774	749	749
CUKUP	699	699	699

1. Sasaran mutu pada aplikasi AMPUH adalah dokumen SAKIP dan kebijakan mutu adalah standar maklumat pelayanan
2. Dalam program si AMPUH terdapat dokumen eviden yangh harus dikelola dengan baik. Dalam hal ini koordinator dalam pengelolaan dokumen pada Pengadilan Tinggi dan



Pengadilan Negeri adalah Sekretaris. Tim pengelola dokumen di SK kan oleh Ketua pengadilan yang dikoordinir Sekretaris dibantu penanggung jawab dokumen di setiap unit, dengan tugas sebagai berikut :

- Menyimpan seluruh dokumen
- Memastikan kesesuaian dokumen yang beredar
- Memastikan pengelolaan sistem dokumentasi sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) berjalan dengan baik”

Tabel 34. Nilai Ampuh Berdasarkan KEKA Badilum
pada Satuan Kerja Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang

No	Nama Satker	Type	Nilai Ampuh 2024	Predikat
1	Pengadilan Tinggi Padang	A	900,22	Unggul
2	Pengadilan Negeri Payakumbuh	II	800,60	Unggul
3	Pengadilan Lubuk Sikaping	II	800,22	Unggul
4	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	II	799,89	Utama
5	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	II	798,63	Utama
6	Pengadilan Negeri Bukittinggi	I	793,07	Utama
7	Pengadilan Negeri Sawahlunto	II	788,52	Utama
8	Pengadilan Negeri Kotobaru	II	787,21	Utama
9	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	II	786,30	Utama
10	Pengadilan Negeri Solok	II	778,97	Utama
11	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	II	777,58	Utama
12	Pengadilan Negeri Muaro	II	770,47	Utama
13	Pengadilan Negeri Padang Panjang	II	767,83	Utama
14	Pengadilan Negeri Batusangkar	II	764,11	Utama
15	Pengadilan Negeri Padang	IA	761,61	Utama
16	Pengadilan Negeri Pariaman	I	751,21	Utama
17	Pengadilan Negeri Painan	II	727,92	Baik

A.2. Zona Integritas

Pengadilan Tinggi Padang merupakan instansi pemerintah yang memberikan pelayanan publik para pencari keadilan, telah menerapkan amanat Undang-Undang No.25 tahun 2009 mengenai Standar Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah. Proses pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM dilakukan secara terus menerus pada masing-masing area perubahan.

Terdapat 2 komponen dalam penilaian pelaksanaan pembangunan zona integritas yaitu Komponen Pengungkit dan komponen hasil. Adapun 6 Area Pembangunan Zona Integritas antaralain:

- 1) Area 1 : Manajemen Perubahan
- 2) Area 2 : Penataan Tatalaksana
- 3) Area 3 : Penataan Sistem Manajemen Sdm Aparatur
- 4) Area 4 : Penguatan Akuntabilitas
- 5) Area 5 : Penguatan Pengawasan
- 6) Area 6 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pada fitur website Pengadilan Tinggi Padang juga disertakan eviden pelaksanaan rencana aksi serta dokumen pendukung yang mudah diakses



Gambar 4. Fitur ZI diakses pada web Pengadilan Tinggi Padang

pt-padang.go.id/#

Thursday, 30 January 2025 10:42 WIB

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI PADANG
Jl. Jenderal Sudirman No. 54 – Kota Padang – Sumatera Barat

BerAKHLAK
#bangga melayani bangsa

BERANDA **Tentang Pengadilan** **Layanan Publik** **Layanan Hukum** **Berita** **Hubungi Kami** **Reformasi Birokrasi**

PENGADILAN TINGGI PADANG

PEMBERITAHUAN

Terhitung sejak tanggal 30 Desember 2024
Pengadilan Tinggi Padang kembali
beroperasi dengan beralamatkan :
Jl. Jend. Sudirman No. 54, Kel. Jati Baru,
Kec. Padang Timur, Kota Padang

Zona Integritas

AMPUH (Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh)

JADWAL SIDANG

SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA PENGADILAN TINGGI PADANG

Area 1 - Manajemen Perubahan

Area 2 - Penataan Tata Laksana

Area 3 - Penataan Sistem Manajemen SDM

Area 4 - Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Area 5 - Penguatan Pengawasan

Area 6 - Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

LIKE ZI

Inovasi Pengadilan

Area 1 - Manajemen Perubahan

Bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas.

Rencana Aksi :

a. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

Pemenuhan :

https://drive.google.com/drive/folders/1oWtZF3iIVy_w-ieCSrglThJnYBzDjRso

Reform :

<https://drive.google.com/drive/folders/1mDPG7MBvFgoPVSMsfHwyOW-djTSZUTec>

982 total pengunjung

A. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

A. 1 PTSP Pengadilan Tinggi Padang

Seluruh satker sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai SK Dirjen Badilum No.77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 beserta perubahannya No.3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan PTSP pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Gambar 5 Video Alur Pelayanan dan Dokumen Pedoman Pelayanan PTSP pada Web Pengadilan Tinggi Padang

pt-padang.go.id/ptsp-pelayanan-terpadu-satu-pintu/

Beranda Tentang Pengadilan Layanan Publik Layanan Hukum Berita Hubungi Kami

sesuai dengan tugas fungsi pengadilan.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PENGADILAN TINGGI P...

SATU PINTU (PTSP)
PENGADILAN TINGGI PADANG

MORE VIDEOS

2:35 / 4:59

1,555 total pengunjung

Dokumen Lampiran :
klik nama file untuk mendownload

File	Description	File size	Downloads
 SK NOMOR 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018	TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI	344 KB	1247



Tabel 35. Penghargaan PTSP Pengadilan Tingkat Pertama
di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang

No.	SATUAN KERJA	PERINGKAT	KATEGORI	WAKTU PENGHARGAAN
1	Pengadilan negeri Padang	Terbaik III	Kategori Layanan Pengadilan / PTSP Terbaik Pengadilan Negeri se Wilayah Hukum PT Padang	10 Januari 2025
	Pengadilan negeri Padang	Terbaik III	Kategori Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Terbaik Pengadilan Negeri se Wilayah Hukum PT Padang	10 Januari 2025
3	PN Bukittinggi	Terbaik I	PTSP Terbaik 1 PN Se- Wilayah Hukum PT Padang Tahun 2024	10 Januari 2025
4	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	Harapan II	layanan pengadilan terbaik	2024
4	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	Harapan II	Layanan Pengadilan / PTSP Terbaik Pengadilan Negeri Se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang	2024



B. Inovasi Pelayanan Publik

B.1. Inovasi Pelayanan Publik pada Pengadilan Tinggi

Tabel 36. Inovasi Pengadilan Tinggi Padang

No.	Nama Satker	Jenis Inovasi	Tujuan / Manfaat	Keterangan
1	Pengadilan Tinggi Padang	Sipacu	Aplikasi Sistem Informasi Permohonan Cuti dan Izin yang diluncurkan oleh Pengadilan Tinggi Padang yang ditujukan untuk memudahkan permohonan cuti dan izin hanya dengan melalui satu aplikasi.	
2		KPT Menyapa	KPT Menyapa adalah program Pengadilan Tinggi Padang untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Pengadilan Negeri di sekitarnya melalui pembinaan yang dilakukan oleh Pimpinan Pengadilan Tinggi Padang.	

3		Simpatik	Aplikasi Simpatik adalah Sistem Informasi Pendaftaran Advokat Secara Elektronik di Pengadilan Tinggi Padang. Aplikasi ini dibuat untuk memudahkan advokat yang akan disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang.	 SIMPATIK. SISTEM PENDAFTARAN PENYUMPAHAN ADVOKAT SECARA ELEKTRONIK PENGADILAN TINGGI PADANG
4		Podcast	Podcast menjadi salah satu sarana dalam menyampaikan informasi yang lebih santai dan mudah untuk diakses. Informasi yang disampaikan berupa edukasi dan pemaparan fungsi dan tugas pada Pengadilan	

B.2. Inovasi Pelayanan Publik pada Pada Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang

Untuk mewujudkan Kinerja Peradilan yang Prima, Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri secara berkesinambungan terus melakukan pembenahan dan inovasi



terhadap segala jenis layanan baik dari segi teknologi informasi dan sarana prasarana yang nantinya akan menunjang kepuasan masyarakat dalam memperoleh layanan di

Pengadilan Tingkat Pertama, berikut inovasi yang dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan peradilan :

Tabel. 37 Inovasi pada Pengadilan Tingkat Pertama

NO.	NAMA SATKER	NAMA INOVASI	KETERANGAN
1	Pengadilan Negeri Padang	Sirandang	Merupakan suatu aplikasi berbasis web yang dimanfaatkan untuk mengelola antrian sidang di Pengadilan Negeri Padang. Dalam sistem ini petugas informasi akan mendata kehadiran para pihak dan mengeluarkan nomor registrasi untuk pihak yang melapor. Jika pihak yang hadir sudah lengkap maka petugas akan membuatkan nomor antrian sidangnya dan menginformasikan kepada panitera pengganti. Panitera pengganti atau petugas piket dapat melakukan panggilan kepada para pihak untuk memasuki ruang sidang.
		Sikap	Merupakan suatu Sistem Informasi Kendali Aset Tertentu dan PPNPN. Dalam aplikasi ini terdapat data PPNPN, Kendaraan Dinas, Rumah Dinas, dan Peralatan TIK. Aplikasi ini digunakan oleh bagian Umum untuk pengelolaan aset yang berisikan daftar aset, status penggunaan, pembayaran pajak, kontrol service dan pemeliharaan. Selain itu, aplikasi ini juga digunakan oleh bagian kepegawaian untuk mengelola data PPNPN meliputi daftar kehadiran



			PPNPN, SK, dokumen kepegawaian, penghargaan dan sanksi.
		Sijempol	Aplikasi SIJEMPOL (Sistem Kerjasama Pelayanan Peradilan Cepat dan Bisaya Ringan Online) adalah aplikasi layanan yang memudahkan pendaftaran perkara dan permohonan surat keterangan secara Online. Aplikasi ini dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran perkara melalui aplikasi E-Court dan pendaftaran surat keterangan melalui aplikasi ERATERANG. Selain itu juga terdapat inovasi pelayanan dari Pengadilan Negeri Padang dimana masyarakat akan terhubung dan tatap muka dengan petugas Pengadilan Negeri Padang melalui zoom meeting untuk dipandu dalam melakukan pendaftaran E-Court dan ERATERANG. Dan inovasi Kendali Perangkat adalah layanan pengontrolan jarak jauh komputer pengguna SIJEMPOL jika membutuhkan bantuan dari Petugas Pengadilan Negeri Padang.



		Sipatuah	Aplikasi SiPATUAH merupakan media elektronik yang bertujuan untuk memudahkan, mempercepat dalam memberikan Pelayanan secara Online atau daring. Aplikasi ini dapat digunakan untuk layanan permohonan / permintaan salinan atau petikan putusan, permintaan fotocopy turunan putusan, legalisir fotocopy turunan putusan dan penelitian, riset, atau permohonan magang
		Mext SIPP	Aplikasi Mext SIPP merupakan aplikasi pendukung dari aplikasi SIPP dan ditujukan khusus untuk para pihak yang sedang terlibat langsung dalam perkara di Pengadilan Negeri Padang, yakni : jaksa, pengacara dan para pihak dalam perkara.
		Posbakum PN Padang	Posbakum PN Padang merupakan sebuah layanan yang memungkinkan pencari keadilan untuk berkonsultasi tentang permasalahan hukum secara daring atau online tanpa perlu datang langsung ke Pengadilan. Whatsapp ini dapat diakses langsung di halaman depan website PN Padang dan dapat digunakan dimanapun baik melalui perangkat komputer maupun selluler.
2	Pengadilan Negeri Pariaman	PTSP Online	Untuk Pelayanan informasi secara online
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	PTSP Online	Untuk Pelayanan informasi secara online



		Posbakum Online	Posbakum PN Padang merupakan sebuah layanan yang memungkinkan pencari keadilan untuk berkonsultasi tentang permasalahan hukum secara daring atau online tanpa perlu datang langsung ke Pengadilan. Whatsapp ini dapat diakses langsung di halaman depan website PN Padang dan dapat digunakan dimanapun baik melalui perangkat komputer maupun selluler.
4	Pengadilan Negeri Sawahlunto	Aplikasi Sidona	SIDONA adalah aplikasi dokumen zona integritas yang mempermudah pengelolaan data dan pelaporan pengembangan kompetensi pegawai.
		Aplikasi SAVIA OK	Merupakan inovasi berupa whatsapp Virtual memudahkan masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu untuk mendapatkan.
		Rekaman Suara integritas dan sistem anti penyuapan dan himbauan protokol kesehatan	Melakukan rekaman Suara integritas dan sistem anti penyuapan dan himbauan protokol kesehatan
5	Pengadilan Negeri Payakumbuh	Evaluasi Atasan kepada Pegawai (SIAGA) V.2.0	Untuk memudahkan Atasan memberikan Penilaian kepada Pegawai dalam pemberian Reward
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	Mext, Mint	Monitoring Pengguna Internal Sistem Informasi Penelusuran Perkara. MInt SIPP diperuntukkan kepada aparaturnya Pengadilan
7	Pengadilan Negeri Batusangkar	E-DEPE (Delivery Penetapan)	E-Depe (Electronic Delivery Penetapan) adalah aplikasi yang memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan penetapan pengadilan secara elektronik



		Brosur	Menyediakan informasi dalam bentuk brosur web yang dapat memudahkan masyarakat dalam memahami dan mendapatkan layanan di Pengadilan Negeri Batusangkar
		Kartu Prioritas	Kartu yang diberikan kepada masyarakat yang tergolong prioritas dalam mendapatkan pelayanan
8	Pengadilan Negeri Solok	E-DEPE (Delivery Penetapan)	E-Depe (Electronic Delivery Penetapan) adalah aplikasi yang memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan penetapan pengadilan secara elektronik
		Brosur	Merupakan alternatif brosur yang disediakan Pengadilan Negeri Solok dan mengurangi penggunaan kertas (paperless). Dampak langsung bagi layanan dengan adanya inovasi adalah pengguna layanan pengadilan dapat mengetahui jenis-jenis layanan Pengadilan Negeri Solok tanpa harus datang cukup dengan mengakses situs web Pengadilan Negeri Solok.
		Kartu Prioritas	Untuk pengguna layanan yang dilayani melewati waktu yang ditetapkan SOP. Kartu ini merupakan kompensasi untuk pengguna layanan. Sehingga pada pelayanan berikutnya pengguna layanan menjadi prioritas untuk dilayani.
9	Pengadilan Negeri Painan	SiBola (Sistem Informasi Brosur Layanan)	Menyediakan brosur elektronik tentang layanan yang ada di. Pengadilan



10	Pengadilan negeri Padang Panjang	Form Pelayanan Digital Dan Video Persyaratan Ganti Nama	Memberikan tampilan infoemasi dalam proses pemberian pelayanan ganti nama
		Form Pelayanan Digital dan Video Tutorial Tata Cara Pelayanan dan Persyaratan Pos Bantuan Hukum	Memberikan tampilan infoemasi dalam proses pemberian pelayanan Posbakum
		Website PPID	Menyediakan layanan informasi publik dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentas
		Posbakum Online	Sebuah layanan yang memungkinkan pencari keadilan untuk berkonsultasi tentang permasalahan hukum secara daring atau online tanpa perlu datang langsung ke Pengadilan. Whatsapp ini dapat diakses langsung di halaman depan website PN Padang dan dapat digunakan dimanapun baik melalui perangkat komputer maupun selluler.
11	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	Aplikasi Pendaftaran Online Surat Kuasa Advokat (POSKA)	Sistem informasi yang digunakan untuk pendaftaran surat kuasa oleh Advokat yang akan mendaftarkan perkara kliennya melalui ecourt Pengadilan Negeri Lubuk Basung secara elektronik.
		Aplikasi Pojok Inovasi Terpadu	Area di dalam pengadilan yang menyediakan layanan atau informasi tertentu. Pojok pengadilan dapat berupa pojok e-court atau pojok baca.



12	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	Sarilamak	Layanan SARILAMAK dapat digunakan penyandang disabilitas dimana Penyandang disabilitas nanti dijemput ke "Kantor Kecamatan terdekat dari tempat tinggal dan diantarkan kembali untuk mendapatkan pelayanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati.
		Posbakum online	Memberikan akses kepada masyarakat dalam mendapatkan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa harus datang ke Pengadilan Negeri Tanjung Pati.
		E-PPID	Layanan SARILAMAK dapat digunakan oleh pencari keadilan secara Gratis di beberapa wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan Jarak maksimal 45 KM dari kantor Pengadilan, yaitu Kecamatan Bukit Barisan, Guguak, Gunung Omeh, Harau, Mungka, Pangkalan Koto Baru, dan Suliki.
		SiMantu	Sebagai Document Control APM/AMPUH
13	Pengadailan Negeri Kotobaru	Pelana	Sebagai Media Pendaftaran Layanan e-Court secara Mandiri
		SIDINI	Aplikasi WhatsApp Auto Respon yang diberi nama SIDINI (Sistem Informasi Pengadilan Negeri)
14	Pengadilan Negeri Muaro	Ksatrio Sirancak	Aplikasi yang memudahkan pencari keadilan pada fasilitas sidang keliling
15	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	Aplikasi Survei IPAK dan IKM Berbasis Web	Aplikasi untuk survey Indeks Persepsi Anti Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat yang dapat diakses melalui web



		Website Ramah Diffabel	Situs web pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat sudah menyediakan fitur - fitur khusus yang memudahkan akses informasi bagi penyandang disabilitas
		Pojok Pengadilan	Area di dalam pengadilan yang menyediakan layanan atau informasi tertentu. Pojok pengadilan dapat berupa pojok e-court atau pojok baca.
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	Sipandi	Sistem Informasi Pelayanan Mandiri adalah pelayanan informasi yang dijawab secara otomatis tentang alur dan persyaratan yang dibutuhkan untuk menerima layanan pada PTSP Pengadilan Negeri Pulau Punjung, yang dapat diakses melalui aplikasi whatsapp.



BAB VI PENGAWASAN

A. INTERNAL

B. EVALUASI



BAB VI PENGAWASAN

A. INTERNAL

Dalam melaksanakan pengawasan Pengadilan Tinggi Padang mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 25 Juli 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dan Peraturan Mahkamah Agung yaitu Perma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Padang adalah pengawasan melekat dimana serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A.1. PENGAWASAN DAERAH

Pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Tinggi Padang meliputi Pengawasan Daerah pada Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang dan Pengawasan Pembinaan Bidang- bidang pada Pengadilan Tinggi Padang, dan menindaklanjuti pengaduan. Pada Pengawasan Daerah dibentuk Tim Pengawasan sesuai SK Nomor : 205/KPT.W3-U/SK.HK1.2.5/III/2024. Sedangkan untuk pengawasan bidang dipimpin oleh Hakim Tinggi dengan SK Nomor : 201/KPT.W3-U/SK.HK1.2.5/III/2024.

Berikut tabel hasil pengawasan daerah pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2024.



TABEL 38

**REKAP HASIL PENGAWASAN SEMESTER I PENGADILAN NEGERI
SE WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI PADANG**

No.	NAMA SATKER	TANGGAL LHP	LHP	TANGGAL TLHP	TLHP	KET
1	PN PADANG	15/7/2024 s.d 16/7/2024	1. Hakim Pengawas Bidang Hukum belum melaksanakan pengawasan bidang di bulan juni 2. Masih terdapat perkara yang masa penahanannya telah atau akan habis dalam jangka waktu kurang dari 10 hari. 3. Perkara No. 5/Pdt.G/2024 terdapat ketidaksesuaian pada pengisian register antara tanggal pelaksanaan mediasi dan tanggal penundaan sidang. 4. Masih terdapat pengeluaran anggaran untuk biaya mesin photo copy. 5. Belum ada buku kendali kenaikan pangkat, pensiun, dan KGB.	12/8/2024	1. Hakim Pengawas Bidang Hukum sudah melaksanakan pengawasan bidang secara rutin sesuai ketentuan. 2. Penahanan sudah diperpanjang oleh Panitera Pengganti tersebut sudah menyesuaikan. 3. Sudah menyesuaikan pengisian register antara tanggal pelaksanaan mediasi dan tanggal penundaan sidang.	



					4. Terhitung sejak temuan tersebut, Pengadilan Negeri Padang tidak lagi membayarkan tagihan fotocopy yang tanggal kwitansi / fakturnya diatas tanggal 16 Juli 2024. 5. Buku kendali KGB sudah dibuat.	
2	PN PARIAMAN	15/5/2024 s.d 16/5/2024	1. Ditemukan court kalender yang belum ditandatangani oleh jaksa penuntut umum serta terdakwa No. 1. 79/Pid.Sus/2024/PN Pmn 2. Ditemukan dalam SIPP perkara yang belum di uploade Berita Acara Persidangan 3. Terdapat anggaran daya dan jasa berupa langganan air tidak terpakai karena Pengadilan Negeri Pariaman tidak menggunakan air dari PDAM,		1. Sudah ditindaklanjuti dan dilaksanakan perbaikan, kedepannya akan lebih teliti 2. Sudah dilakukan pemanggilan kepada semua panitera pengganti untuk Kembali dimintak lebih disiplin dalam membuat dan uploade acara persidangan.	



			melainkan air sumur bor milik sendiri. 4. Masih terdapat BMN yang sudah rusak berat dan tidak bisa dpergunakan lagi untuk menunjang tupoksi Pengadilan Negeri Pariman belum dilakukan penghapusan.		3. Sudah diajukan revisi anggaran dan akan dihapus pada saat pengajuan anggaran baru pada aplikasi E-Iplans. 4. Sudah dilakukan tindak lanjut oleh bagian umum dan keuangan.	
3	PN PAINAN	15/5/2024 s.d 16/5/2024	1. Ditemukannya tanggal BHT yang belum diisi pada kolom keterangan Register Induk Perkara Perdata Gugatan Tahun 2023, sedangkan berkas perkara tersebut telah diserahkan ke Kepaniteraan Muda Hukum pada perkara NOMOR 16/Pdt.G/2023/PN Pnn 2. masih ada uang panjar sisa perkara yang lum diambil, yakni perkara nomor 12/Pdt.G/2007/PNPnn senilai Rp2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).	7/6/2024	1. Telah ditindaklanjuti dengan mengisi tanggal BHT pada Register Induk perkara tersebut secara lengkap. 2. Sudah dilakukan penginputan biaya perkara banding pada nomor perkara 12/Pdt.G/2007/PNPnn 3. Sudah dilakukan penindaklanjutan atas temuan yang ada, Panitera Pengganti telah menandatangani court	



			3. Terjadinya temuan pada Kepaniteraan Hukum karena ketidakcermatan Panitera Pengganti dalam memeriksa kelengkapan berkas perkara sebelum dilakukan minutasi berkas perkara Kepaniteraan Muda Pidana. 4. Belum dibuatnya laporan perjalanan dinas yang berisikan output kinerja yang jelas 5. Tidak ada monitoring dan evaluasi terhadap buku control KGB dan cuti pegawai		calender berkas perkara tersebut. 4. Sudah dibuatkan blanko Laporan Perjalanan Dinas dan diminta untuk mengisi blanko tersebut serta ditandatangani dan didokumentasi berupa foto dan undangan. 5. sub bagian kepegawaian membuat buku control KGB dan cuti pegawai.	
4	PN SOLOK	18/4/2024 s.d 19/4/2024	1. Pada saat dilakukan uji petik terhadap 10 berkas di Kepaniteraan Muda Hukum ditemukan adanya putusan perkara perdata yang penulisan penyebutan pihak belum sesuai template Putusan, diantaranya yaitu dalam perkara nomor: a. 3/Pdt.G./2023/PN Sik b. 22/Pdt.G/2023/PN Sik	30/4/2024	1. Format putusan telah disesuaikan dengan SK KMA Nomor 359/SK/KMA/XII/2022 Tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama	



			c. 6/Pid.Sus/2024/PN Sik 2. Buku Regiter Pidana Tahun 2024 belum di paraf perlembarnya oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok 3. Sekretaris selaku Pengguna Anggaran belum melakukan pemeriksaan kas ke Bendahara Keuangan secara rutin setidak – tidaknya sekali dalam satu bulan 4. Ditemukan beberapa BMN seperti Laptop dalam kondisi Rusak Berat belum dilakukan penghapusan BMN		dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung. 2. Buku register Induk Pidana Biasa Tahun 2024 sudah diparaf oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok 3. KPA sudah melakukan pemeriksaan kas di brankas Bendahara Pengeluaran pada tanggal 23 April 2024 dan sudah dibuatkan berita acara pemeriksaan kas. 4. Sudah dilakukan penghapusan barang BMN yang rusak.	
5	PN KOTO BARU	10/6/2024 s.d 11/6/2024	1. Register induk perkara pidan biasa untuk bulan Mei 2024 sudah dilakukan penutupan tetapi belum ditandatangani oleh petugas pembuat register. 2. Biaya perkara l uang pihak ketiga secara	20/6/2024	1. Sudah dilakukan penutupan register oleh petugas pembuat register 2. Telah dilakukan pemeriksaan berkas biaya perkara secara	



			mendadak oleh Ketua Pengadilan Negeri satu kali tiga bulan tahun 2024 belum dilaksanakan. 3. Masih ada pegawai yang tidak melakukan presensi online melalui Aplikasi Sikep 4. Beberapa fitur di website tidak <i>diupdate</i> seperti maklumat pelayanan, menu LAPTAH, LAKIP, LRA dan LHKPN masih tahun 2020		mendadak oleh Ketua pengadilan Negeri Kotobaru satu kali tiga bulan pada tahun 2024 3. Telah dilaksanakan monev absensi Sikep secara online oleh Pegawai Pengadilan Negeri Kotobaru. 4. Sudah dilakukan update pada menu website yang menjadi temuan.	
--	--	--	---	--	--	--



6	PN PADANG PANJANG	22/4/2024 s.d 23/4/2024	1. Pada saat dilakukan uji petik terhadap 10 berkas perkara di Kepaniteraan Muda Hukum ditemukan adanya putusan perkara perdata yang penulisan penyebutan pihak belum sesuai dengan template putusan, diantaranya yaitu dalam perkara nomor: 1. 16/Pdt.P/2023/PN Pdp 2. 18/Pdt.P/2023/PN Pdp 3. 8/Pdt.G/2023/PN Pdp 4. 82/Pid.B/2023/PN Pdp 2. Belum melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan pembinaan sesuai Perma No. 7 Tahun 2016	3/5/2024	1. Telah mengimplementasikan SK KMA Nomor 359/SK/KMA/XII/ 2022 2. Telah dilaksanakn monev sesuai Perma NO. 7 Th 2016	
7	PN BATUSANGKAR	12/10/2024 s.d 13/10/2024	1. Halaman terakhir Buku register indukpidana biasa tidak di tanda tangani oleh ketua Pengadilan Negeri batusangkar.	27/10/2024	1. Sudah Di tanda tangani halam terakhir Buku register indukpidana biasa, oleh Ketua Pengadilan Negeri	



			2. Perkara No. 1/Pid.B/2024/PN Bsk tanggal 24 Januari 2024, BA yang diupload tidak sama dengan yang di berkas 3. Uji petik berkas pidana nomor 15/Pid.B/2022/PN Bsk, BAS ke 5 tanggal 10 Mei 2022 tertulis Kamis seharusnya Selasa.		batusangkar. 2. Sudah diupload dokumen sesuai dengan dokumen yang dibutuhkan. 3. Menghimbau kepada Panitera Pengganti agar lebih teliti dalam membuat BAS (Berita Acara Sidang)	
8	PN BUKITTINGGI	20/6/2024 s.d 21/6/2024	1. Ditemukan SK penunjukan pengelola biaya proses penyelesaian perkara PN Bukittinggi yang dikeluarkan oleh Panitera yang seharusnya oleh Ketua Pengadilan Negeri. 2. Court calender perkara perdata No. 40/Pdt.G/2023/PNBkt tidak ditandatangani oleh Majelis Hakim dan PP. 3. Ditemukan tidak adanya laporan perjalanan dinas . 4. Belum diperbaruinya perhitungan sewa rumah dinas.	2/6/2024	1. Mencabut SK tersebut dan menerbitkan SK baru yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi. 2. Court calender tersebut sudah ditandatangani oleh Majelis Hakim dan PP. 3. Sudah dibuat laporan perjalanan dinas dan kedepan setiap pelaksana perjalanan dinas diwajibkan menyampaikan laporan	



			5. Ditemukan laporan bulanan PTSP tidak sesuai dengan format		perjalanan dinas 4. Sudah dilakukan pembaruan perhitungan sewa rumah dinas sesuai dengan HSBGN 5. Format laporan bulanan PTSP sudah dibuat sesuai dengan SK Dirjen Badillum No. 114 Tahun 2024.	
9	PN LUBUK BASUNG	27/6/2024 s.d 28/6/2024	1. Panmud Perdata belum melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penginputan di dalam SIPP. 2. Dalam buku register induk perkara pidana pada kolom keterangan upaya hukum kasasi belum terisi dalam perkara Nomor 3/Pid.Sus/2024/PNPLbb DAN Nomor 22/Pid.Sus/2024/PNLbb 3. Penyerahan berkas perkara ke bagian hukum tidak sesuai SOP. 4. Rencana kenaikan pangkat (RKP) belum dibuat untuk periode 1 tahun 5. Belum dilakukan monev terhadap rumah	29/7/2024	1. Sudah Dilakukan monev dalam rapat berjenjang. 2. Petugas register telah mengisi buku register induk perkara sesuai temuan. 3. Selanjutnya penyerahan berkas perkara akan dilakukan sesuai SOP. 4. Akan dibuat rencana kenaikan pangkat (RKP) untuk periode 1 tahun. 5. Sudah dilakukan monev terhadap rumah dinas PN	



			dinas.		Lubuk Basung	
10	PN PAYAKUMBUH	6/6/2024 s.d 6/6/2024	1. Belum melaksanakan sosialisasi eksternal mengenai persidangan elektronik pidana berdasarkan Perma 8 Tahun 2022 dan SK KMA No 365/SK/XII/2022. 2. Panmud belum melakukan monev terhadap kelengkapan berkas banding. 3. Belum adanya eviden rapat pembuatan SAKIP dan evaluasi SAKIP	7/6/2024	1. Sudah dilaksanakan sosialisasi eksternal mengenai persidangan elektronik pidana berdasarkan Perma 8 Tahun 2022 dan SK KMA No 2. Sudah dilakukan kelengkapan berkas banding. 3. Untuk kedepannya akan	



					dilakukan rapat money dan rapat terkait SAKIP.	
11	PN MUARO	27/6/2024 s.d 28/6/2024	1. Ditemukan SK penunjukan pengelola biaya proses penyelesaian perkara PN Muaro yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muaro. 2. Buku SKUM belum diberi nomor SKUM secara berurutan sampai terisi secara keseluruhan. 3. Belum ada Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muaro tentang TIM telaah eksekusi. 4. Tidak dilakukan scan untuk surat keluar pada pelayanan PTSP dan tidak dimasukkan ke dalam edoc aplikasi PTSP+ 5. Ditemukan barang BMN di Pengadilan Negeri Muaro yang rusak berat dan harus dilakukan penghapusan dan terdapat BMN yang belum di PSP kan	10/7/2024	1. Sudah perbaikan sesuai dengan PERMA No. 3 Tahun 2012 2. Buku SKUM sudah diberi nomor secara berurutan. 3. Sudah dibuat SK terkait TIM penelaah eksekusi. 4. Sudah dilakukan perbaikan pada system administrasi surat pada PTSP sesuai temuan. 5. Sudah dilakukan penghapusan barang BMN yang rusak berat dan sudah dilakukan PSP pad barang tersebut.	
12	PN SAWAHLUNTO	13/6/2024	1. Belum dilakukan sosialisasi secara	28/6/2024	1. Telah dilakukan money	



		s.d 14/6/2024	berkala terkait Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1, 2, dan 3 Tahun 2022 ke pihak internal dan pihak eksternal secara berkala. 2. Kepaniteraan Hukum Perdata belum sepenuhnya memahami dan menjalankan SOP, tugas pokok dan fungsi dengan baik khususnya mengenai monitoring dan evaluasi setiap bulan terhadap pengiriman berkas perkara kasasi dan PK Perdata. 3. Pembayaran pajak STNK belum dibayarkan dengan tertib.		berkala terkait Perma Nomor 1, 2 dan 3 Tahun 2022 ke pihak internal dan eksternal. 2. Kepaniteraan Hukum sudah melakukan monev atas kinerja dan pengiriman berkas perkara kasasi dan PK Perdata. 3. Sudah dilakukan pembayaran pajak STNK.	
13	PN TANJUNG PATI	10/6/2024 s.d 11/6/2024	1. Ditemukan tidak sinkronisasi antara berita acara persidangan pada SIPP dengan temuan pada SIPAPU yang belum diupload. 2.	1/7/2024	1. Satgas SIPP telah melakukan monitoring data dan sinkronisasi data pada SIPAPU. Berita Acara sudah diunggah di SIPP dan tidak ada notifikasi pada MIS, namun pada SIPAPU terbaca belum diunggah	
14	PN LUBUK SIKAPING	22/4/2024	1. Dalam hal terdakwa ditahan, berkas	20/5/2024	1. Berkas kasasi bundel A dan	



		s.d 23/4/2024	kasasi bundel A dan B belum diterima oleh MA maksimal 30 hari kalender (2304/PAN/HK/01/12/2020) 2. Tidak terdapat eviden ceklis perkara kasasi pada perdata. 3. Belum ditempel labelisasi pada barang inventaris. 4. Pada ruang server tidak disediakan dua unit AC untuk menjaga suhu ruangan server agar tetap dingin. 5. Belum adanya SK Pengelola Perangkat IT		B sudah dikirimkan ke Mahkamah Agung dan diterima maksimal 30 hari kalender. 2. Sudah ditambahkan eviden ceklis perkara kasasi pada perdata dan sudah dimasukkan kedalam eviden Ampuh 3. Sudah diberikan merek pada barang inventaris. 4. Adanya hibah AC dari pihak ketiga (Bank BRI Cabang Lubuk Sikaping). 5. Sudah dibuat SK Pengelola Perangkat IT.	
15	PN PASAMAN BARAT	24/6/2024 s.d 25/6/2024	1. Ditemukan kolom pada buku register banding nomor 7/Pdt G/2024/PN Psb belum di isi. 2. Ditemukan kolom keterangan dalam buku register induk perkara pidana BHT,	26/6/2024	1. Sudah dilakukan pengisian nomor register pada perkara tersebut. 2. Sudah diberikan catatan dan untuk selanjutnya akan lebih	



			belum ditambah catatan tanggal menyerahkan ke bagian hukum. 3. Ditemukan perkara pidana (Asusila – KDRT) perkara perdata (perceraian) dan perkara anak yang wajib dianonimisasi namun belum dilakukan anonimisasi. 4. Pada sub bagian umum dan keuangan adanya pelaporan pajak yang dipungut oleh bendahara selaku wajib pungut belum membuat laporan setiap bulan ke kantor pajak yang dapat dilakukan pelaporan pajak secara online (e-buppot)		teliti. 3. Sudah dilakukan anonimisasi. 4. Sudah dilakukan bimbingan teknis dengan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) melalui aplikasi BUPOT.	
16	PN PULAU PUNJUNG	17/4/2024 s.d 18/4/2024	1. Surat pengantar beserta Pemberitahuan Putusan Kasasi dan Putusan Banding tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Padang. 2. Pada buku SKUM belum diberi nomor secara utuh dan berlanjut. 3. Masih terdapat Barang Milik	23/4/2024	1. Sudah dikirimkan surat pemberitahuan putusan kasasi ke Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Padang. 2. Sudah diberi nomor pada buku SKUM secara utuh dan berlanjut.	



			Negara (BMN) yang belum diusulkan ke Sekretaris Mahkamah Agung Cq. Kepala Biro Perlengkapan untuk penetapan status penggunaan BMN.		3. Sudah dilakukan pengusulan surat ke Kepala Biro Perlengkapan terkait penetapan BMN.	
--	--	--	--	--	--	--

Adapun hasil pengawasan daerah pada tahun 2024 secara umum adalah sebagai berikut :

1. Pada umumnya administrasi dan penyelenggaraan peradilan baik bidang teknis maupun kesekretariatan pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang sudah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya.
2. Kendala yang masih dihadapi adalah kurangnya pegawai pada setiap satuan kerja sehingga ada beberapa formasi jabatan yang masih kosong, sehingga untuk beberapa pekerjaan terjadi keterlambatan,
3. Fasilitas sarana dan prasarana yang masih kurang untuk beberapa Satker, sehingga perlunya tambahan belanja modal untuk



pengadaan fasilitas kantor yang layak pakai

4. Perlunya movev yang lebih disiplin dalam hal penyelesaian perkara agar lebih tertib, khususnya pada Pengadilan yang memiliki banyak volume perkara.
5. Setiap Satker harus lebih disiplin lagi dalam melakukan perawatan pada barang BMN
6. Satgas SIPP harus lebih memperhatikan dan melakukan monitoring data dan sinkronisasi data pada SIPAPU.



B. EVALUASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengadilan Tinggi Padang telah melakukan evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2021, dengan metode sesuai yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya. Pada tahun 2023 Pengadilan Tinggi Padang telah melakukan evaluasi kinerja terhadap Pengadilan tingkat pertama di wilayah hukumnya sebagai berikut ;

Tabel 39. Nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2023 pada Satuan Kerja Wilayah Hukum
Pengadilan Tinggi Padang

No.	Pengadilan Negeri (PN)	NILAI PER KOMPONEN SAKIP TAHUN 2023					Kategori
		Perencanaan Kinerja (30%)	Pengukuran Kinerja (30%)	Pelaporan Kinerja (15%)	Evaluasi Internal (25%)	Nilai (%)	
1.	PN Solok	24	24	12	18,25	78,2	BB
2.	PN Pasaman Barat	23,1	24	11,25	20	77,8	BB
3.	PN Padang	24	24	10,8	18,75	77,6	BB
4.	PN Padang Panjang	23,1	24	12	18,25	77,4	BB



5	PN Bukittinggi	24	22,5	10,8	20	77,3	BB
6	PN Muaro	24	22,5	12	18,75	77,2	BB
7	PN Batusangkar	22,5	22,5	11,25	18,75	75	BB
8	PN Pariaman	21,6	24	10,8	18,25	74,6	BB
9	PN Payakumbuh	22,5	22,5	10,8	18,75	74,6	BB
10	PN Painan	21,6	24	12	22,5	74,4	BB
11.	PN Tanjung Pati	22,5	21,6	11,25	18,75	74,1	BB
12.	PN Sawahlunto	24	21	10,8	17,5	73,3	BB
13.	PN Kotobaru	21	21,9	10,8	19,5	73,2	BB
14.	PN Pulau Punjung	22,5	22,5	9,9	18,25	73,2	BB
15.	PN Lubuk Sikaping	21,6	21,9	10,8	18,75	73	BB
16.	PN Lubuk Basung	21	21,6	10,5	17,5	70,6	BB

Berdasarkan hasil capaian kinerja masing-masing unit kerja tersebut, direkomendasikan untuk:

- Perlu diadakan pelatihan tentang tata cara evaluasi kepada Pengadilan Tingkat Banding agar penilaian kinerja lebih optimal;
- Perlunya diadakan pelatihan terkait penyusunan dan evaluasi dokumen SAKIP, agar laporan kinerja tersusun dengan baik.
- Perlu diberikan penghargaan kepada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding bagi nilai SAKIP-nya yang tertinggi, seperti penambahan anggaran perjalanan dinas sehingga menimbulkan motivasi lebih untuk membuat laporan yang terbaik;
- Perlu adanya anggaran di Pengadilan Tinggi Padang untuk melakukan bimbingan teknis kepada Pengadilan Negeri Se Wilayah Pengadilan Tinggi Padang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja.



PENGADILAN TINGGI PADANG

BAB VII PENUTUP

A. KESIMPULAN

B. REKOMENDASI



PENGADILAN TINGGI PADANG



BAB VII PENUTUP

A. KESIMPULAN

Selama tahun 2024 Pengadilan Tinggi Padang dan Pengadilan Negeri dibawahnya tetap berupaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan memberikan pelayanan publik dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan.

1. Jumlah perkara yang masuk pada tahun 2024 pada Pengadilan Tinggi Padang mengalami peningkatan dari tahun 2023
2. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pengadilan Tinggi Padang terhadap Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya dilaksanakan sesuai dengan rencana dan jadwal.
3. Semua Satker pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang sudah melaksanakan pelayanan PTSP sesuai pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada SK NOMOR 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 .
4. Pengadilan Negeri diseluruh wilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang sudah mengoptimalkan penggunaan *e-Court*. Selain itu Pengadilan Negeri sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang juga telah menerapkan *e-e-court* (proses persidangan secara elektronik) dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pengadilan Negeri diseluruh wilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang saat ini berusaha untuk mengimplementasikan Aplikasi e-BERPADU untuk memudahkan koordinasi antar aparat penegak hukum, kerja sama antar aparat penegak hukum dalam menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan teknis operasional pelayanan publik dan/atau pendukung pelayanan publik.
6. Perlunya penambahan anggaran rumah dinas untuk beberapa Pengadilan Negeri, karena adanya factor promosi dan mutasi, sehingga rumah yang tersedia tidak mencukupi, begitu juga dengan anggaran yang tersedia pada tahun 2024.



B. Rekomendasi

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di pengadilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang maka diperlukan:

- a. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, pembangunan gedung kantor dan rumah dinas.
- b. Perlunya diadakan bimtek untuk kesekretariatan dan kepaniteraan untuk meningkatkan kinerja.
- c. Perlunya dilakukan monev yang lebih disiplin lagi, agar penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dapat terlaksana lebih baik dan lebih cepat.



KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG

NOMOR : 325 /KPT.W3-U/SK.HK1.2.5/XII/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2024
PENGADILAN TINGGI PADANG**

KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG

- Membaca** : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4506/SEK/OT.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024;
- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk terciptanya budaya kerja yang professional, transparan, efisiensi dan efektif, maka setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan harus dilaporkan sesuai dengan Surat Keputusan ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Memberlakukan Buku I pada Bagian Ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Padang perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Padang;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Padang perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Padang;
 - d. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Pengadilan Tinggi Padang ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Laporan tersebut.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;

2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Permen PAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I Pada Bagian Ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2024 PENGADILAN TINGGI PADANG.**
- Pertama : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai tim penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Padang;
- Kedua : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Tinggi Padang. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 dikirimkan kepada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dalam bentuk *Hardcopy* dan *Softcopy* melalui email : renogevlap2@gmail.com pada minggu pertama bulan Februari 2025
- Ketiga : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Padang Tahun Anggaran 2025;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PADANG

Pada Tanggal : 30 Desember 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG,



ADE KOMARUDIN

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Padang
Nomor : 325 /KPT.W3-U/SK.HK1.2.5/XII/2024
Tanggal : 30 Desember 2024

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2024
PENGADILAN TINGGI PADANG**

1. Pembina / Penanggung Jawab : - H. Ade Komarudin, S.H., M.Hum
(Ketua Pengadilan Tinggi Padang)
- Suwono, S.H., S.E., M.Hum
(Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang)
2. Ketua Tim : Jon Effreddi, S.H., M.H
(Hakim Tinggi)
3. Wakil Ketua : R. Moch. Chairael Fathah, S.H., M.Hum
(Panitera)
4. Sekretaris : - Endri Novian, S.E., M.M
(Sekretaris)
- Ade Candra, S.H
(Kabag Perencanaan dan Kepegawaian)
5. Anggota : 1. Masrizal, S.H., M.H (Koordinator)
2. Budiman, S.H (Kabag Umum dan Keuangan)
3. Nurmaidaris , S.H (Panitera Muda Pidana);
4. Zulkifli, S.H (Panitera Muda Hukum)
5. Syalferri , S.H (Panitera Muda Perdata);
6. Marhaban, S.H., M.H (Panitera Muda Khusus Tipikor);
7. Ayu Davmayanti, S.H (Kasub Kepegawaian dan TI);
8. Suyono, S.H (Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga);
9. Novita Sari, S.Kom (Kasubag Keuangan dan Pelaporan);
10. Aznel Mahendra, S.Si., M.H
(Kasubag Rencana Program dan Anggaran)
11. Mai Fitri Yadi, S.Kom (Perencana Ahli Pertama)
12. Suci Khairun Nisaa, S.AP (Klerek – Penelaah Teknis Kebijakan)
13. Rika Syafnita Putri, S.E (Perencana Ahli Pertama)
14. Syafriadi, S.H (PPNPN)
6. Sekretariat : Rencana Program dan Anggaran



KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG,

ADE KOMARUDIN